

Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi

Terakreditasi "B" No. 55/A-DIKTI/KEP/2006

- Analisis Hubungan Antara Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan dan SPT Masa Dengan Penerimaan Pajak (studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Palmerah)* 192-213
Deddy Arief Setiawan
- Pengaruh Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial dan Motivasi Sebagai Variabel Intervening* 214-235
Mohamad Nasir
- Pengaruh Tingkat Pengungkapan Sukarela Dalam Laporan Tahunan Terhadap Koefisien Respon Laba* 236-257
Sewi Ismarwati Rahayu
- Pengaruh Arus Kas Operasi Terhadap Perubahan Dividen Dengan Akrual Sebagai Variabel Moderating* 258-289
Maythi
- The Implementation of Product Profitability Analysis Strategy in Increasing Business Performance (Case Illustration: A Garment Industry in Bandung)* 290-304
**Elizabeth T Manurung
Arthur Parboya
Thomas Kurniawan**

Vol 21, No 2 (2021)

SEPTEMBER

TABLE OF CONTENTS

ARTICLES

**[DESIGN FINANCIAL ACCOUNTING USING BLOCKCHAIN
APPROACH IN EDUCATION](#)**

[PDF](#)

161-174

DOI : [10.25105/mraai.v21i2.9448](#)

*Widhy Setyowati, Untung Rahardja, Qurotul Aini, Nuke Puji Lestari Santoso,
Wahyu Yustika Prihastiwi*



[10.25105/mraai.v21i2.9448](#)



Abstract views : 0 |



PDF views : 0

**[DINAMIKA KARAKTERISTIK KOMITE AUDIT PADA AUDIT
REPORT LAG](#)**

[PDF](#)

175-190

DOI : [10.25105/mraai.v21i2.9048](#)

*Anak Agung Putu Gede Bagus Arie Putu Gede Bagus Arie Susandya, Ni Nyoman
Ayu Suryandari*



[10.25105/mraai.v21i2.9048](#)



Abstract views : 0 |



PDF views : 0

[FENOMENA DISFUNGSIONAL AUDIT](#)

[PDF](#)

191-206

DOI : [10.25105/mraai.v21i2.9401](#)

Emma Saur Nauli Sipayung, Dhea Erka Zahara, Ice Nasyrh Noor



[10.25105/mraai.v21i2.9401](#)



Abstract views : 0 |



PDF views : 0

**[HERDING BEHAVIOR: MENGEKSPLORASI SISI ANALISIS BROKER
SUMMARY](#)**

[PDF](#)

207-226

DOI : [10.25105/mraai.v21i2.9502](#)

Ainun Naim, I Made Dwi Hita Darmawan, Nurafifah Wulandari



[10.25105/mraai.v21i2.9502](#)



Abstract views : 0 |



PDF views : 0

[KUALITAS LAPORAN KEUANGAN INSTANSI PEMERINTAH](#)

[PDF](#)

227-244

DOI : [10.25105/mraai.v21i2.9402](#)

Deliza Henny I, Sondang Dame Rebecka, Harti Budi Yanti



[10.25105/mraai.v21i2.9402](#)



Abstract views : 0 |



PDF views : 0

[PROFILE OF TAX COMPLIANCE RESEARCH IN INDONESIA](#)

[PDF](#)

245-272

DOI : [10.25105/mraai.v21i2.9793](#)

Dewi Prastiwi



[10.25105/mraai.v21i2.9793](#)



Abstract views : 0 |



PDF views : 0

**[POLITICAL CONNECTIONS AND TAX AGGRESSIVENESS: THE
ROLE OF GENDER DIVERSITY AS A MODERATING VARIABLE](#)**

[PDF](#)

273-292

DOI : [10.25105/mraai.v21i2.9794](https://doi.org/10.25105/mraai.v21i2.9794)

Abidah Dwi Rahmi Satiti, Mohammad Syafik, Wahyu Widarjo



[10.25105/mraai.v21i2.9794](https://doi.org/10.25105/mraai.v21i2.9794)



Abstract views : 0 |



PDF views : 0

THE EFFECT OF TAX EXPENSE, BONUS MECHANISM, AND TUNNELING INCENTIVE TO TRANSFER PRICING DECISION WITH PROFITABILITY AS A MODERATING VARIABLE

[PDF](#)

293-308

DOI : [10.25105/mraai.v21i2.10404](https://doi.org/10.25105/mraai.v21i2.10404)

Murtanto Murtanto, Bonita Bonita



[10.25105/mraai.v21i2.10404](https://doi.org/10.25105/mraai.v21i2.10404)



Abstract views : 0 |



PDF views : 0

Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi

HOME ABOUT LOGIN REGISTER SEARCH CURRENT ARCHIVES ANNOUNCEMENTS

[Home](#) > [About the Journal](#) > [Editorial Team](#)

Editorial Team

EDITOR IN CHIEF

Harti Budi Yanti, Web of Science Researcher ID [C-7412-2018] Scopus ID [57211790418] Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, Indonesia

BOARD OF EDITOR

Lidia Wahyuni, FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS TRISAKTI, Indonesia
cicely Delfina delfina, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, Indonesia
Ayu Aulia Oktaviani, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, Indonesia
Ice Nasyrh, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, Indonesia
Yuana Jatu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, Indonesia
Moh Shidqon, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, Indonesia



Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](#).

Dukungan Asosiasi Profesi



Sertifikat Akreditasi SINTA 2

Nomor : 21/E/KPT/2018



SK Akreditasi SINTA 2

Nomor : 148/M/KPT/2020



POLITICAL CONNECTIONS AND TAX AGGRESSIVENESS: THE ROLE OF GENDER DIVERSITY AS A MODERATING VARIABLE

Abidah Dwi Rahmi Satiti¹

Mohammad Syafik²

Wahyu Widarjo³

^{1,2} Universitas Sebelas Maret; Universitas Islam Lamongan

³ Universitas Sebelas Maret

*abidahdwirahmi@student.uns.ac.id

Abstract

Aggressive tax management actions lead to a low tax ratio in Indonesia. The purpose of this study was to determine the effect of political connections on tax aggressiveness and to determine the moderation of management gender diversity on the effect of political connections on tax aggressiveness. This research is a type of quantitative research using moderated regression analysis using STATA software. The dependent variable of this study is tax aggressiveness, the independent variable is political connections and the moderating variable is management gender diversity. The sample of this research is the mining sector companies listed on the IDX during the 2015-2019 period. Secondary data is obtained based on the annual financial statements that are on the IDX. The findings show that political connections have a negative effect on tax aggressiveness and management gender diversity cannot moderate the negative effect of political connections on tax aggressiveness. This research has implications for the government in making regulations related to taxation and input to the government to pay attention to political connections as a gap in aggressive tax management. This research also contributes to companies in giving consideration to avoiding tax aggressiveness because it can damage the company's reputation, as well as providing input to companies to pay attention to the existence of political connections and management gender diversity.

Keywords: *Gender Diversity; Political Connections; Tax Aggressiveness.*

Abstrak

Tindakan manajemen pajak agresif menyebabkan rendahnya tax ratio di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh koneksi politik terhadap agresivitas pajak serta mengetahui moderasi diversitas gender manajemen pada pengaruh koneksi politik terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi moderasi menggunakan Software STATA. Variabel dependen penelitian ini agresivitas pajak, variabel independen koneksi politik dan variabel moderasi diversitas gender manajemen. Sampel penelitian ini perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI selama periode 2015-2019. Data sekunder diperoleh berdasarkan laporan keuangan tahunan yang berada pada BEI. Penelitian

ini memberikan keunggulan karena meneliti variabel moderasi diversitas gender manajemen dalam mengetahui perannya pada pengaruh koneksi politik terhadap agresivitas pajak, yang masih jarang diteliti pada penelitian sebelumnya. Temuan menunjukkan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak dan diversitas gender manajemen tidak memoderasi pengaruh negatif koneksi politik terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini memberikan implikasi pada pemerintah dalam pembuatan regulasi terkait perpajakan dan masukan kepada pemerintah untuk memberikan perhatian pada koneksi politik sebagai celah adanya manajemen pajak yang agresif. Penelitian ini juga berkontribusi bagi perusahaan dalam memberikan pertimbangan untuk menghindari agresivitas pajak karena dapat merusak reputasi perusahaan, serta memberikan masukan pada perusahaan untuk memberikan perhatian pada keberadaan koneksi politik serta diversitas gender manajemen.

Kata kunci : agresivitas pajak; diversitas gender; koneksi politik

JEL Classification : M41, H26, H32, J16, G3.

Submission date: July 2021

Accepted date: September 2021

**Corresponding Author*

PENDAHULUAN

Pendapatan dari sektor perpajakan merupakan salah satu dari kontribusi pendapatan utama bagi Indonesia. Tahun 2019 kontribusi tersebut mencapai 82,5% dari total penerimaan nasional. Hal ini berarti pemerintah sangat bergantung pada penerimaan perpajakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat (Nurisdianto, 2019). Namun, sampai saat ini, permasalahan yang terjadi di Indonesia adalah rendahnya *tax ratio*. Penerimaan pajak tidak pernah lagi mencapai target sejak tahun 2008. Tahun 2020 merupakan tahun ke-12 Indonesia mengalami *shortfall* pajak (Suyanto, 2021).

Beberapa kasus terkait pajak di Indonesia antara lain adalah kasus pajak dari PT Adaro Energy Tbk. Kasus tersebut dilakukan melalui *transfer pricing* dalam salah satu anak perusahaan di Singapore. Tercatat dalam Global Witness tahun 2009 hingga 2017, Batu bara di Indonesia telah terjual oleh PT Adaro (lebih dari 70%) dengan *low price* ke Coaltrade, lalu terjual kembali oleh anak perusahaan tersebut dengan *high price*. Kesempatan ini diambil oleh Coaltrade untuk mendapatkan keuntungan dan membukukannya di Singapore yang memiliki *tax rate* lebih rendah daripada Indonesia. Selanjutnya, keuntungan dialihkan ke Mauritius, yaitu negara yang tidak memiliki *tax rate* (Thomas, 2019). Kasus pajak pertambangan lain yang terjadi adalah gugatan Direktorat Jenderal Pajak terhadap perusahaan PT Multi Sarana Avindo atas perpindahan kuasa tambang melalui penurunan nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang wajib dibayarkan. DJP menggugat sebanyak 3 kali dengan nominal 7,7 miliar (Yulawati, 2019). Kasus serupa juga dilakukan oleh PT Asian Agri atas usaha penggelapan pajak yang dilakukan tahun 2007 (Thomas, 2019).

Praktik agresivitas pajak menjadi penyebab rendahnya *tax ratio* di Indonesia (Thomas, 2019). Perusahaan memiliki beberapa strategi dan pilihan untuk mengejar tarif pajak yang lebih rendah (Drope & Hansen, 2009). Agresivitas pajak memberikan celah bagi manajemen perusahaan dalam mencari kesempatan untuk memperoleh

keuntungan jangka pendek, dan tidak sesuai dengan harapan pemegang saham dalam jangka panjang (Tingting Ying, Brian Wright, 2016). Praktik agresivitas pajak mencari celah kelemahan - kelemahan perundang-undangan pajak yang tidak bertentangan dengan hukum. Istilah agresivitas pajak dapat digunakan bergantian dengan istilah penghindaran pajak (Chen et al., 2011). Skema agresivitas pajak berada pada *grey area*, yakni cenderung mencari peluang pada kelemahan - kelemahan perundang-undangan tersebut dalam menurunkan jumlah pajak yang dibayarkan (Pohan 2011). Namun, jika suatu perusahaan dicurigai melakukan pajak agresif, perusahaan tersebut dapat menanggung beban reputasi biaya. Agresivitas pajak merupakan tindakan beresiko yang berdampak pada pembayaran denda dan mengancam reputasi perusahaan (Chen et al., 2011). Media massa populer sering memberikan pandangan negatif terhadap perusahaan dengan posisi pajak yang agresif (Nasution & Jonnergård, 2017).

Agresivitas pajak dapat dipengaruhi oleh koneksi politik. Perusahaan yang terkoneksi politik mempunyai *leverage* yang lebih tinggi, membayar pajak lebih rendah, serta memiliki kekuatan pasar yang lebih kuat (Faccio, 2011). Ada beberapa alasan perusahaan membina koneksi politik, di antaranya, *pertama*, perusahaan yang terkoneksi politik memiliki risiko deteksi yang lebih rendah karena mereka dilindungi oleh koneksi ke politisi. *Kedua*, Perusahaan yang terkoneksi politik mampu mengakses informasi lebih cepat mengenai peraturan dan penegakan pajak, yang memungkinkan mereka lebih kompleks dalam berstrategi. *Ketiga*, perusahaan memiliki lebih sedikit tekanan pasar untuk transparan. *Keempat*, koneksi politik dapat mengurangi biaya politik menjadi agresivitas pajak. *Kelima*, koneksi politik dapat dikaitkan dengan tingkat agresivitas pajak yang lebih tinggi karena berdampak dari pengambilan risiko mereka (Kim & Zang, 2016). Lobi pajak juga dilakukan perusahaan sebagai upaya melakukan agresivitas pajak (Davis et al., 2016).

Perusahaan yang terkoneksi politik mendapat manfaat dari koneksi mereka, terutama di negara-negara dengan tingkat korupsi yang lebih tinggi (Faccio, 2006). Koneksi politik juga lebih sering dilakukan di negara-negara berkembang daripada di negara maju (Chua et al., 2007). Di Indonesia, koneksi politik umumnya dilakukan dengan menempatkan orang yang mempunyai kedekatan dengan pemerintah ke dalam struktur organisasi perusahaan, baik komisaris maupun direksi. Salah satu fenomena di Indonesia, tokoh politik yang ada di dalam PT. Adaro Energy, yang menjabat sebagai salah satu pemegang saham di dalam perusahaan dan juga menduduki jabatan di sebuah partai politik tokoh nasional Sandiaga Salahudin Uno yang juga menjabat sebagai wakil dewan Pembina Partai Gerindra (Fajri, 2019).

Perkembangan penelitian terkait pengaruh koneksi politik terhadap agresivitas pajak di berbagai negara memiliki hasil yang beragam. Di Amerika Serikat, ditemukan bahwa perusahaan yang terkoneksi secara politik lebih agresif terhadap pajak daripada perusahaan yang tidak terkoneksi politik (Kim & Zang, 2016). Penelitian pada perusahaan perbankan syariah di Cina mendapatkan hasil bahwa koneksi politik berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak (Ajili & Khlif, 2020). Sebuah studi dari (Faccio, 2011) menemukan terdapat hubungan antara koneksi politik dan tarif pajak yang efektif untuk sampel perusahaan internasional dari 47 negara. Koneksi politik salah satu faktor signifikan yang mempengaruhi agresivitas pajak pada perusahaan AS (Do et al., 2015). Terdapat pengaruh positif antara lobi pajak dengan agresivitas pajak (Davis et al., 2016). Di penelitian lain, hanya ditemukan hubungan lemah antara lobi dan tarif pajak perusahaan, dan tidak ada hubungan sistematis pada sampel Fortune 500 atau Fortune 1000 terbesar perusahaan Amerika Serikat (Drope & Hansen, 2009).

Penelitian di China, menemukan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Perusahaan BUMN lebih memilih membayar pajak dengan jumlah yang tinggi tanpa menggunakan koneksi politik yang dimilikinya (Jian et al., 2012).

Hasil penelitian lain yang meneliti hubungan antara koneksi politik dan agresivitas pajak di negara berkembang antara lain (Adhikari et al., 2006) memberikan bukti bahwa perusahaan Malaysia dengan koneksi politik membayar tarif pajak efektif yang signifikan jauh lebih rendah daripada yang tidak memiliki koneksi politik. Dalam konteks yang sama, (Aswadi et al., 2017) memeriksa hubungan antara koneksi politik dan agresivitas pajak perusahaan di Malaysia dan perusahaan yang terkoneksi secara politik lebih agresif terhadap pajak daripada tidak terkoneksi politik.

Penelitian di Indonesia juga memberikan hasil yang beragam. Koneksi politik berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (Fajri, 2019). Penelitian pada perusahaan BUMN menunjukkan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Perusahaan BUMN akan berusaha untuk membayar pajak besar kepada pemerintah untuk memberikan kontribusi kepada negara yang pada akhirnya membuat direktur utama tersebut tetap dipertahankan menjadi direktur utama atau promosi ke perusahaan BUMN yang lebih besar serta mempertegas legitimasi politiknya (Pranoto et al., 2013). Berbeda dengan hasil tersebut, ditemukan pula penelitian yang menyatakan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Perusahaan yang sahamnya sebagian besar dikuasai oleh pemerintah ditetapkan sebagai wajib pajak yang memiliki resiko rendah. Perusahaan akan menjaga citra yang baik agar keberlangsungan usahanya dapat terjamin (Ayu et al., 2017). Hasil ini juga sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa perusahaan BUMN merupakan perusahaan yang dimiliki negara, sehingga lebih diawasi oleh negara (Hijriani et al., 2017).

Faktor lain yang dianggap dapat memoderasi pengaruh koneksi politik terhadap agresivitas pajak adalah diversitas gender. Kehadiran wanita di dewan direksi mengurangi agresivitas pajak perusahaan (Hoseini et al., 2019), (Lanis et al., 2017) (Damayanti & Supramono, 2019), (Murteira & Proença, 2020), dan (Authors, 2016). Tingkat penghindaran pajak menurun ketika jumlah wanita pada dewan meningkat (Jarboui et al., 2020). Kehadiran wanita di dewan perusahaan mampu mengatur secara signifikan tingkat manajemen perilaku keterlibatan dalam praktik agresivitas pajak dan mengurangi keseluruhan risiko dalam hal stabilitas posisi pajak (Boussaidi & Hamed-Sidhom, 2020). Pengaruh gender pada konservatisme akuntansi dan manajemen laba didasarkan pada fakta bahwa perbedaan gender dalam sikap terhadap risiko mendukung gagasan bahwa wanita lebih menghindari risiko daripada pria (Francis et al., 2014). Literatur akuntansi gender selama periode 1994-2016, menunjukkan bahwa keberadaan wanita di dewan, komite audit, CFO atau CEO mengarah pada pelaporan yang lebih konservatif, tingkat pengungkapan sosial dan lingkungan yang lebih tinggi dan agresivitas pajak yang lebih rendah (Khlif & Achek, 2017).

Hasil penelitian yang berbeda juga ditemukan. Pria dan wanita memiliki kemungkinan yang sama untuk melakukan pajak yang agresif (Bobek et al., 2013). Pria dan wanita sama-sama cenderung memberikan nasihat terkait agresivitas pajak. Tidak ada pengaruh signifikan direktur wanita terhadap agresivitas pajak setelah mengendalikan karakteristik perusahaan dan mekanisme tata kelola (Oyenike & Olayinka, 2016). Tidak ditemukan peran diversitas gender dalam agresivitas pajak karena perbedaan gender akan ditolak begitu wanita dan pria memasuki profesi atau pekerjaan tertentu (Nasution & Jonnergård, 2017). Diversitas gender tidak memiliki

interaksi dengan keadilan, budaya dan cinta uang atau terhadap persepsi etis tentang penghindaran pajak (Ariyanto, 2020).

Peneliti berharap dengan melakukan penelitian terkait variabel agresivitas pajak, koneksi politik, dan diversitas gender akan mampu berperan serta dalam menuntaskan kasus-kasus terkait agresivitas pajak. Dengan rendahnya agresivitas pajak, maka akan meningkatkan tingginya *tax ratio* di Indonesia. Pembaruan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini menyelidiki pengaruh koneksi politik terhadap agresivitas pajak dengan menggunakan variabel moderasi diversitas gender, yang mana belum pernah dilakukan penelitian yang melihat pengaruh tersebut dari sisi diversitas gender. Selain itu, penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor pertambangan di Indonesia. Sektor tambang merupakan sektor primadona yang memberikan kontribusi besar pada pendapatan negara, tetapi juga terdapat beberapa kasus-kasus perpajakan yang berasal dari sektor ini. Penelitian ini berkontribusi kepada pemerintah dalam pembuatan regulasi terkait perpajakan dan masukan kepada pemerintah untuk memberikan perhatian pada koneksi politik dan diversitas gender sebagai celah melakukan agresivitas pajak. Penelitian ini juga berkontribusi bagi perusahaan dalam memberikan pertimbangan untuk menghindari agresivitas pajak karena dapat merusak reputasi perusahaan serta mempertimbangkan diversitas gender dalam jabatan dewan.

REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS

Teori Agensi

Teori agensi muncul akibat adanya penyerahan wewenang dari principal kepada agen dalam menjalankan operasional perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). Prinsipal adalah pemegang saham atau investor, sedangkan agen adalah manajemen yang mengelola perusahaan atau manajer. Inti dari hubungan keagenan adanya pemisahan fungsi antara kepemilikan di investor dan pengendalian di pihak manajemen. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa teori agensi menjelaskan adanya konflik yang akan timbul antara pemilik dan manajemen perusahaan. Adanya pemisahan antara pemilik dengan manajemen perusahaan dapat menimbulkan masalah, antara lain yaitu adanya kemungkinan manajer melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan keinginan atau kepentingan prinsipal.

Kaitannya dengan penelitian ini bahwa teori agensi teori yang muncul akibat adanya perbedaan kepentingan antara pihak pemilik yang mengharapkan kinerja perusahaan yang baik agar tingkat pengembaliannya semakin tinggi dengan manajemen yang memiliki kepentingan sendiri dari bonus. Perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen dapat memengaruhi berbagai hal menyangkut kinerja perusahaan salah satunya kebijakan perusahaan terkait pajak. Manajer sebagai agen mempunyai kepentingan untuk memperoleh kompensasi atau insentif sebesar-besarnya melalui laba yang tinggi atas kinerjanya dan pemegang saham ingin menekan pajak yang dibayarkan melalui laba yang rendah.

Political Favoritism Effect dan Bureaucratic Incentive Effect

Political Favoritism Effect adalah suatu kondisi dimana *political connection* berpengaruh pada semakin tingginya agresivitas pajak. (Ajili & Khlif, 2020) mengemukakan bahwa koneksi politik berhubungan dengan agresivitas pajak. Semakin baik kemampuan manajer dalam melobi pemerintah, maka tingkat agresivitas pajaknya

akan semakin tinggi. Dengan terkoneksi secara politik, maka perusahaan akan merasa terlindungi oleh pemerintah maupun politisi dan memiliki akses pada informasi pajak preferensial.

Perusahaan yang terkoneksi politik memiliki keuntungan dari risiko deteksi yang lebih rendah, akses ke informasi mengenai perubahan pajak, rasa berpuas diri menjadi kurang transparan, dan sifatnya dari aktivitas berbasis risiko (Faccio, 2016). Keuntungan-keuntungan dari koneksi politik tersebut mengakibatkan perusahaan dengan mudah melakukan agresivitas pajak (Aswadi et al., 2017). Semakin baik kemampuan manajer dalam melobi pemerintah, maka tingkat agresivitas pajaknya akan semakin tinggi. Dengan terkoneksi secara politik, maka perusahaan akan merasa terlindungi oleh pemerintah maupun politisi dan memiliki akses pada informasi pajak preferensial. Perusahaan yang terkoneksi politik memiliki keuntungan dari risiko deteksi yang lebih rendah, akses ke informasi mengenai perubahan pajak, menjadi kurang transparan, dan cenderung melakukan aktivitas berbasis risiko.

Bureaucratic Incentive Effect adalah kondisi ketika *political connection* berdampak pada semakin rendahnya tindakan agresivitas pajak. Koneksi politik dapat meningkatkan pengawasan dalam perusahaan. Perusahaan yang membina suatu koneksi politik memiliki kemungkinan besar untuk dipantau secara ekstensif oleh pembuat kebijakan, pemerintah, media, serta masyarakat. Pengawasan ekstensif ini membuat perusahaan tersebut akan lebih memilih menghindari aktivitas berisiko, seperti agresivitas pajak.

Agresivitas Pajak

Pajak (*tax*) diartikan sebagai pengeluaran perusahaan yang signifikan yang dikenakan pada penghasilan perusahaan, dengan cara mengurangi laba bersih yang diterima oleh entitas serta pemegang saham (Chen et al., 2011). Pajak menjadi kontribusi penting dari perusahaan kepada masyarakat (Preuss, 2010). (Hanlon & Heitzman, 2010) mengartikan agresivitas pajak adalah menurunnya nilai pajak secara eksplisit yang dilakukan dengan teknik penghematan pajak secara legal hingga ilegal oleh pihak yang berwenang atas itu. Klasifikasi legal maupun ilegal ini belum jelas pemisahannya, sehingga penentuannya ditentukan oleh otoritas pajak setelah tindakan agresivitas pajak itu terjadi (Lee et al., 2015). Istilah agresivitas pajak dapat digunakan bergantian dengan istilah penghindaran pajak (Chen et al., 2011).

Strategi dari tindakan agresivitas pajak berada di wilayah abu-abu, yaitu kecenderungan mencari celah pada kelemahan - kelemahan perundang-undangan dan aturan perpajakan dengan cara mengurangi wajib pajak yang harus dibayarkan. Realisasinya, tak ada unsur pidana dari tindakan agresivitas pajak karena entitas telah melakukan tindakan transaksi secara benar dan menyertakan bukti yang akurat serta tidak melanggar ketentuan atau aturan yang ditetapkan. Akan tetapi, yang dikhawatirkan jika perusahaan terlalu agresif dalam menghindari pajak, maka terdapat potensi perusahaan melakukannya dengan cara ilegal yang bertentangan dengan undang-undang (Mohanadas et al., 2019). Jika perusahaan terbukti melakukan tindakan ilegal, otoritas pajak dapat menjatuhkan sanksi berat terhadap perusahaan. Sanksi tersebut berpotensi menghitamkan nama baik perusahaan, terutama di hadapan para pemangku kepentingan (Nasution & Jonnergård, 2017), (Chen et al., 2011).

Koneksi Politik

Koneksi politik sering dikaitkan pada hubungan politik entitas dengan pemerintah. Entitas dianggap terkoneksi politik jika seorang *manager*, *shareholder* mayoritas, *shareholder* blok atau kerabat dekat sebelumnya, sedang, maupun pernah memiliki suatu jabatan dalam parlemen, petinggi negara, atau partai perwakilan parlemen, dikecualikan Tentara Nasional Indonesia dan kepolisian (Faccio, 2006). *Political connection* bertujuan untuk meningkatkan *bargaining power* dan posisi entitas pada pemerintahan (Cheng, 2014). Koneksi politik dilakukan melalui penempatan kedekatan dewan komisaris, direksi, maupun struktur organisasi entitas dengan pemerintah (Fisman, 2001).

Political connection berpengaruh terhadap agresivitas pajak (Ajili & Khelif, 2020), (Aswadi et al., 2017), (Faccio, 2016), (Adhikari et al., 2006). Koneksi politik dijadikan sebagai cara perusahaan untuk mengetahui dengan lebih baik kapan perencanaan pajak agresif kemungkinan besar ditoleransi (Ajili dan Khelif, 2020). Perusahaan yang terkoneksi politik memiliki keuntungan dari risiko deteksi, akses ke informasi mengenai perubahan pajak, kepuasan diri karena kurang transparan, dan dalam sifat aktivitas berbasis risiko, kami memprediksi hubungan positif antara koneksi politik dan agresivitas pajak perusahaan yang terkoneksi politik dapat melindungi perusahaan dari deteksi dan risiko litigasi di masa depan (Kim & Zhang, 2015). Perusahaan dengan memiliki hubungan politik dengan pemerintah berarti memungkinkan perusahaan untuk mengakses informasi mengenai perubahan masa depan dalam peraturan perpajakan dan memungkinkan eksplorasi perbedaan deret waktu yang lebih baik dalam undang-undang perpajakan atau penegakan pajak menggunakan strategi perpajakan yang kompleks (Aswadi et al., 2017).

Perusahaan yang terkoneksi politik akan menggunakan kedekatannya dengan politisi dan pemerintah untuk memperoleh manfaat di pasar dan menghindari kemungkinan terkena hukuman dari kegiatan ekspropriasi dan manajemen yang buruk (Muttakin et al., 2015). Koneksi politik dapat menurunkan kemungkinan deteksi (misalnya tempat penampungan pajak ilegal) dan/atau menurunkan denda jika terdeteksi melakukan agresivitas pajak (Faccio, 2016). Tindakan manajemen pajak agresif yang terlalu berat yang terdeteksi oleh pengawas dan otoritas pajak akan berakibat pada jatuhnya reputasi perusahaan, di sisi lain upaya penghindaran pajak tersebut akan optimal jika manajer memiliki kemampuan dalam berkoneksi politik. Penghindaran pajak akan optimal jika perusahaan mampu menurunkan beban pajak dan menghindari hukuman melalui adanya koneksi politik (Li, 2016).

H₁: Koneksi Politik berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak

Diversitas Gender

Teori gender dapat dikategorikan ke dalam dua pandangan bersaing yang biasa disebut *alpha* dan *beta*. Bias *alpha* cenderung memperburuk perbedaan gender, sedangkan bias *beta* cenderung mengabaikannya. Bias *alpha* menekankan perbedaan antara pria dan wanita. Hal ini menunjukkan bahwa wanita bersifat emosional dibandingkan dengan pria yang berakal (Welsh, 1992).

Keberadaan wanita di jajaran dewan dinilai dengan sikap kehati-hatian yang tinggi, teliti dan cenderung menghindari resiko dibandingkan dengan pria. Selain itu, wanita memiliki standar etika dan moral yang lebih tinggi, menunjukkan sikap pemikiran independen yang lebih baik, dan memfasilitasi keputusan yang lebih tepat yang meningkatkan tingkat transparansi di tingkat dewan, dan meningkatkan tingkat

kepercayaan dewan. Kehadiran wanita pada dewan direksi dapat secara signifikan mengurangi kemungkinan agresivitas pajak (Lanis et al., 2017), (Hoseini et al., 2019). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat penghindaran pajak menurun ketika tingkat wanita di dewan meningkat (Jarboui et al., 2020).

Kehadiran manajer puncak dan pemilik wanita dalam perusahaan dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Wanita memiliki sifat lebih transparan. Direktur wanita meningkatkan efisiensi fungsi pemantauan dewan (Riguen et al., 2020). Bahkan, mereka memiliki kecenderungan kuat untuk mempekerjakan auditor berkualitas tinggi untuk melindungi reputasi mereka. Karakteristik wanita memberikan perhatian etis yang lebih besar dan penghindaran resiko, membantu mengurangi pengaruh negatif koneksi politik pada tindakan-tindakan beresiko, serta menjaga kepentingan lembaga dari pengaruh buruk dari pribadi (Murteira & Proença, 2020). Kehadiran ini mewakili *capital asset* yang lebih fokus pada tata kelola lebih baik dan reputasi jangka panjang, serta mengurangi kemungkinan masalah terkait risiko, seperti manajemen laba dan penghindaran pajak (Damayanti & Supramono, 2019).

Diversitas gender pada konservatisme akuntansi dan manajemen laba didasarkan pada fakta bahwa perbedaan gender dalam sikap terhadap risiko mendukung gagasan bahwa wanita lebih menghindari risiko daripada pria. Wanita lebih berhati-hati daripada pria dalam pengakuan dan pengukuran pendapatan dan aset dan menggunakan kontrol yang lebih tinggi dari kabar baik daripada kabar buruk (Francis et al., 2014). Para wanita di dewan cenderung mengurangi risiko laporan keuangan yang dimanipulasi, karena wanita lebih cenderung ke arah kejujuran, kehati-hatian, dan konservatisme (Riguen et al., 2020). Representasi wanita pada dewan, komite audit, CFO atau CEO mengarah pada pelaporan yang lebih konservatif, tingkat pengungkapan sosial dan lingkungan yang lebih tinggi, dan agresivitas pajak yang lebih rendah (Khelif & Achek, 2017).

H₂: Diversitas gender memperlemah pengaruh positif koneksi politik terhadap agresivitas pajak

METODE PENELITIAN

Sampel dan Data

Jenis penelitian ini kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Penelitian ini menganalisis perusahaan pada sektor pertambangan di BEI tahun 2015-2019. Pemilihan sektor pertambangan masih menjadi sektor primadona yang mana harga komoditas pertambangan mengalami kenaikan harga yang terus bergerak, serta pada sektor pertambangan ditemukan beberapa kasus terkait pajak.

Sampel penelitian diambil melalui *purposive sampling*, menggunakan *criteria*: (1) perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019; (2) tidak *delisting* pada waktu observasi penelitian; (3) menerbitkan *annual report* serta laporan keuangan berkala tahun 2015-2019 dan telah mempublikasikan laporan keuangan di situs perusahaan dan atau situs BEI ; (4) perusahaan yang melaporkan laba dan beban pajak penghasilan tahun 2015-2019; dan (5) perusahaan yang mengalami laba pada tahun 2015-2019.

Pengukuran Variabel

Variabel Dependen

Variabel dependen penelitian ini agresivitas pajak. Agresivitas pajak yaitu penurunan *explicit tax value* melalui teknik penghematan pajak secara legal sampai dengan ilegal dengan penentuan derajat agresif sendiri oleh pihak yang menguasainya (Hanlon & Heitzman, 2010). Agresivitas pajak diukur melalui tarif pajak efektif (ETR). ETR diperoleh melalui *tax expense* dibagi *pretax income*. ETR mengukur pembayaran beban pajak tahun berjalan, yang di dalamnya mencakup beban pajak kini dan tangguhan. (Hanlon & Heitzman, 2010), (Aswadi et al., 2017), (Ajili & Khelif, 2020), dan (Adhikari et al., 2006).

Variabel Independen

Variabel independen penelitian ini koneksi politik. Perusahaan terkoneksi politik jika seorang *manager*, *shareholder* mayoritas, *shareholder* blok atau kerabat dekat sebelumnya, sedang, maupun pernah memiliki suatu jabatan dalam parlemen, petinggi negara, atau partai perwakilan parlemen, dikecualikan Tentara Nasional Indonesia dan kepolisian (Faccio, 2006). Koneksi politik dinilai melalui *dummy model* yang diberikan nilai 1 jika perusahaan terkoneksi politik dan diberikan nilai 0 jika tidak terkoneksi politik.

Variabel Moderasi

Variabel moderasi penelitian ini diversitas gender. Diversitas gender diukur dengan persentasi jumlah wanita di dewan direksi. Diversitas gender dihitung dengan cara jumlah wanita pada dewan direksi dibagi dengan jumlah dewan direksi (Boussaidi & Hamed-Sidhom, 2020); (Hoseini et al., 2019), dan (Lanis et al., 2017).

Variabel Kontrol

Variabel kontrol penelitian ini ukuran perusahaan, ROA, dan *capital intensity*. Ukuran perusahaan dapat dijadikan sebagai motivasi bagi perusahaan melakukan agresivitas pajak. Semakin tinggi jumlah aset, semakin kompleks kegiatan usaha perusahaan. Perusahaan besar tentunya memiliki tingkat kerumitan usaha yang lebih rumit dari pada perusahaan kecil. Ukuran perusahaan diukur dengan logaritma natural *total* dari *asset* sebesar nilai buku (Aswadi et al., 2017), (Ajili & Khelif, 2020), dan (Adhikari et al., 2006).

ROA untuk mengukur keuntungan entitas yang diperoleh melalui pemanfaatan *asset*. ROA diperoleh dengan membagi laba bersih dengan total *asset* (Aswadi et al., 2017), (Ajili & Khelif, 2020), dan (Adhikari et al., 2006).

Capital intensity mengacu pada seberapa besar proporsi aset tetap pada total asset perusahaan. Pengukuran intensitas modal yaitu total asset tetap dibagi total aset. *Capital intensity* memiliki hubungan dengan pajak. Ketika proporsi aset tetap cukup tinggi maka perusahaan akan dihadapkan pada beban penyusutan yang tinggi pula (Aswadi et al., 2017), (Ajili & Khelif, 2020), dan (Adhikari et al., 2006).

Model Penelitian

Model penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Moderasi. Data diolah menggunakan *Software* STATA. Menurut Sharma (1981) *moderating variabel* diartikan sebagai variabel bebas yang akan mampu menguatkan atau melemahkan

korelasi *independent variable* lainnya terhadap *dependent variable*. Model penelitian ini adalah berikut.

$$ETR = \alpha_0 + \beta_{10}PolCon_{i,t} + \beta_{11} DIV_GD_{i,t} + \beta_{12}PolCon_{i,t} * DIV_GD_{i,t} + \beta_{13}SIZE_{i,t} + \beta_{14}ROA_{i,t} + \beta_{15}CI_{i,t} + e_{i,t}$$

Keterangan:

ETR : *Effective Tax Rate*;
 PolCon : Koneksi Politik;
 DIV_GD : Diversitas Gender;
 SIZE : Ukuran perusahaan;
 ROA : *Return on Asset*; dan
 CI : *Capital Intensity*.

Tabel 1
Operasional dan Pengukuran Variabel

Variable	Definisi Operasional	Pengukuran
Variabel Dependen: Agresivitas Pajak (TAG)	Agresivitas pajak adalah penurunan <i>explicit tax value</i> melalui teknik penghematan pajak secara legal sampai dengan ilegal dengan penentuan derajat agresif sendiri oleh pihak yang menguasainya (Hanlon & Heitzman, 2010), (Aswadi et al., 2017), (Ajili & Khlif, 2020), dan (Adhikari et al., 2006).	$ETR = \frac{\text{tax expense}}{\text{pretax income}}$
Variabel Independen: Koneksi Politik (PolCon)	Perusahaan terkoneksi politik jika seorang <i>manager</i> , <i>shareholder</i> mayoritas, <i>shareholder</i> blok atau kerabat dekat sebelumnya, sedang, maupun pernah memiliki suatu jabatan dalam parlemen, petinggi negara, atau partai perwakilan parlemen, dikecualikan Tentara Nasional Indonesia dan kepolisian (Faccio, 2006).	Koneksi politik dinilai dengan <i>dummy model</i> , yaitu jika entitas terkoneksi politik diberikan nilai 1. Jika entitas tidak terkoneksi politik, diberikan nilai 0.
Variabel Moderasi: Diversitas Gender (DIV_GD)	Diversitas gender merupakan persentase jumlah wanita di dewan direksi. Diversitas gender dihitung dengan cara jumlah wanita pada dewan direksi dibagi dengan jumlah dewan direksi (Boussaidi & Hamed-Sidhom, 2020); (Hoseini et al., 2019), dan (Lanis et al., 2017).	$DivGen = \frac{\text{Jumlah Wanita pada Dewan Direksi}}{\text{Jumlah Dewan Direksi}}$
Variabel Kontrol: 1. Ukuran Perusahaan (SIZE)	Pengukuran ukuran perusahaan dilakukan dengan cara logaritma natural dari total asset sebesar nilai buku (Aswadi et al., 2017), (Ajili & Khlif, 2020), dan (Adhikari et al., 2006).	$SIZE = \ln(\text{Total Aset})$

Variable	Definisi Operasional	Pengukuran
2. <i>Return On Asset (ROA)</i>	ROA merupakan adalah <i>ratio</i> untuk mengukur keuntungan perusahaan yang diperoleh melalui pemanfaatan <i>asset</i> (Aswadi et al., 2017), (Ajili & Khlif, 2020), dan (Adhikari et al., 2006).	$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Asset}}$
3. <i>Capital Intensity (CI)</i>	<i>Capital Intensity</i> mengacu pada seberapa besar proporsi aset tetap terhadap total aset perusahaan yang diukur dengan total aset tetap dibagi total asset (Aswadi et al., 2017), (Ajili & Khlif, 2020), dan (Adhikari et al., 2006).	$\text{Capital Intensity} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Asset}}$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 2
Statistik Deskriptif

	N	Mean	Std. Dev.	Minimum	Maximum
ETR	135	0.303	0.314	0.000	3.527
DIV_GD	135	0.089	0.141	0.000	0.500
Size	135	29.315	2.399	22.352	39.224
CI	135	0.667	0.758	0.000	9.041
ROA	135	0.059	0.001	0.001	0.380
Valid N (listwise)	331				

Variabel Dummy			
Variabel	%Score1	%Score0	Total%
PolCon	(50) 37%	(85) 63%	(135) 100%

Berdasarkan Tabel 2, diketahui bahwa variabel dependen dalam penelitian ini yaitu Agresivitas Pajak memiliki nilai rata-rata sebesar 0.303. Rentang ini cukup rendah pada variabel ini, dilihat dari perbedaan antara nilai maksimum dan minimum. Variabel independen penelitian koneksi politik yang diukur menggunakan variabel *dummy* 1 apabila perusahaan terkoneksi politik dan 0 untuk sebaliknya. Hasil penelitian didapatkan 50 perusahaan yang dewan direksinya terkoneksi dengan politik dengan presentase 37%. Perusahaan yang tidak terkoneksi dengan politik sebesar 85 dengan presentase 63%.

Variabel Moderasi dalam penelitian ini diversitas gender yang diukur dengan rasio anggota dewan direksi wanita yang diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan. Nilai rata-rata yang diperoleh adalah 0.089. Hasil menunjukkan bahwa rata-rata sampel anggota dewan direksi wanita dalam perusahaan memiliki 8,9% dalam perusahaan sampel.

Variabel kontrol yang pertama yakni ukuran perusahaan yang diukur menggunakan logaritma natural dari aset. Nilai rata-rata yang diperoleh adalah 29.315. Rentang ini cukup rendah pada variabel ini, dilihat dari perbedaan antara nilai

maksimum dan minimum. Variabel kontrol yang kedua yakni *capital intensity* yang diukur menggunakan total aset tetap dari total aset. Nilai rata-rata yang diperoleh adalah 0.667. Rentang ini cukup rendah pada variabel ini, dilihat dari perbedaan antara nilai maksimum dan minimum. Variabel kontrol yang ketiga yakni profitabilitas yang diukur menggunakan ROA. Nilai rata-rata yang diperoleh adalah 0.059. Rentang ini cukup rendah pada variabel ini, dilihat dari perbedaan antara nilai maksimum dan minimum.

Tabel 3
Person Correlation

	Koneksi Politik	Diversitas Gender	ETR	Size	CI	Profit
PolCon	1.000					
DIV_GD	0.166* (0.055)	1.000				
ETR	0.242** (0.005)	-0.007 (0.936)	1.000			
Size	-0.239** (0.005)	-0.225** (0.009)	-0.059 (0.500)	1.000		
CI	-0.150* (0.082)	0.096 (0.269)	-0.063 (0.467)	-0.133 (0.123)	1.000	
ROA	-0.012 (0.892)	0.080 (0.355)	0.215* (0.012)	0.094 (0.277)	-0.010 (0.910)	1.000

p-values in parentheses
* *p* < 0.1, * *p* < 0.05, ** *p* < 0.01

Hasil Analisis Regresi Moderasi

Hipotesis penelitian ini diuji dengan analisis regresi moderasi. Sebelum dilakukan uji regresi moderasi, peneliti melakukan uji asumsi klasik yakni uji normalitas data, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas. Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui data penelitian yang sudah berdistribusi normal dan data bebas dari heteroskedastisitas dan multikolinearitas. Model penelitian ini sudah layak dilakukan uji regresi linear berganda karena sudah lolos dari uji asumsi klasik. Nilai *adjusted R2* sebesar 0,078 yang artinya variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 7,8% sementara 92,2% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain diluar model penelitian.

Tabel 4
Moderated Regression Analysis

Variabel	Coef	ETR		
		Std. Err	t	P>t
PolCon	0.1861205	0.0663008	2.81	0.006
Size	-0.0059108	0.011653	-0.51	0.613
CI	-0.0141404	0.0359741	-0.39	0.695
ROA	1.282951	0.4704264	2.73	0.007
DIV_GD	0.008508	0.2802654	0.03	0.976
Polcon*DIV_GD	-0.321094	0.3814161	-0.84	0.401
F	0.0128			
Adj-R2	0.0757			

Variabel	ETR			
	Coef	Std. Err	t	P>t
R2	0.1170			
N	135			

t statistics in parentheses

* $p < 0.1$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$

Variabel agresivitas pajak diproksikan menggunakan ETR, dimana interpretasi ETR berbanding terbalik dengan agresivitas pajak (Agresivitas pajak = ETR dikalikan dengan -1). Hasil penelitian Tabel 3 menunjukkan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Variabel koneksi politik menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0.1861205 dan nilai signifikansi sebesar 0,006. Nilai tersebut mengindikasikan pengaruh positif antara koneksi politik terhadap ETR, yang berarti menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif antara koneksi politik terhadap agresivitas pajak. Semakin tinggi koneksi politik maka akan semakin tinggi nilai ETR, yang berarti semakin tinggi koneksi politik pada perusahaan maka semakin rendah tingkat agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan demikian H_1 ditolak.

Variabel interaksi antara koneksi politik dan diversitas gender sebesar 0,401 yang artinya tidak dapat memoderasi. Peneliti telah membuang data sampel perusahaan yang dewan direksinya terdiri atas laki-laki saja (satu gender). Pengaruh diversitas gender terhadap agresivitas pajak sebesar 0,404 yang berarti diversitas gender tidak dapat memoderasi. Berdasarkan hasil tersebut maka variabel moderasi diversitas gender tidak dapat memperlemah pengaruh koneksi politik terhadap agresivitas pajak, sehingga H_2 ditolak.

Tabel 5
Uji Robust

	(1) ETR	(2) ETR	(3) ETR
PolCon	0.151** (2.15)	0.158** (2.05)	0.186*** (2.81)
Size	-0.004 (-0.93)	-0.005 (-1.17)	-0.006 (-0.51)
CI	-0.012 (-1.42)	-0.010 (-0.84)	-0.014 (-0.39)
ROA	1.236** (2.59)	1.277** (2.52)	1.283*** (2.73)
DIV_GD		-0.162 (-0.87)	0.009 (0.03)
KP*DIV_GD			-0.321 (-0.84)
_cons	0.289** (2.49)	0.349*** (2.65)	0.355 (1.00)
N	135	135	135
R ²	0.107	0.112	0.117
F	0.000	0.000	0.000

t statistics in parentheses

* $p < 0.1$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$

Tabel 5 merupakan hasil uji *robust*. Dalam pengujian regresi ditemukan hal-hal yang dilanggar dalam pengujian asumsi klasik. Pengujian ini dapat dilakukan untuk

mengurangi bias dari hasil penelitian dan penting untuk menganalisis data yang dipengaruhi oleh outlier dan meminimalkan pengaruh outlier terhadap suatu model sehingga akan diperoleh model yang terbaik. Temuan ini juga kuat dengan hampir tidak ada perbedaan dengan regresi linier berganda dengan tingkat signifikan.

Pengaruh Koneksi Politik terhadap Agresivitas Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak. Teori *Bureaucratic Incentive Effect* menjelaskan kondisi ketika *political connection* berdampak pada semakin rendahnya tindakan agresivitas pajak. Koneksi politik dapat meningkatkan pengawasan dalam perusahaan. Perusahaan yang membina suatu koneksi politik memiliki kemungkinan besar untuk dipantau secara ekstensif oleh pembuat kebijakan, pemerintah, media, serta masyarakat. Pengawasan ekstensif ini membuat perusahaan tersebut akan lebih memilih menghindari aktivitas berisiko, seperti agresivitas pajak.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yaitu (Chaney et al., 2011), (Jian et al., 2012), (Pranoto et al., 2013), (Hijriani et al., 2017), dan (Nurrahmi & Rahayu, 2020) yang menemukan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Perusahaan yang terkoneksi politik akan menjadi perhatian publik, sehingga perusahaan lebih berhati-hati dalam membayar pajak. Perusahaan menghindari kegiatan yang menimbulkan risiko reputasi perusahaan, seperti risiko yang ditimbulkan dari agresivitas pajak (Chaney et al., 2011). Perusahaan yang terkoneksi politik dapat memanfaatkan koneksinya dalam hal penghindaran pajak, tetapi perusahaan tidak selalu menggunakan koneksinya karena lebih memilih menjaga citra perusahaan agar dipercaya oleh masyarakat, media, pemerintah, maupun investor demi menjaga eksistensi perusahaan di masa depan (Nurrahmi & Rahayu, 2020). Walaupun perusahaan terkoneksi secara politik, perusahaan tetap berupaya untuk berkontribusi pada negara melalui pembayaran pajak yang berjumlah besar. Perusahaan tidak berkeinginan memanfaatkan koneksi politiknya untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan (Pranoto et al., 2013). Eksekutif perusahaan, khususnya perusahaan BUMN lebih memilih untuk membayar pajak tertinggi BUMN karena bertujuan agar dapat berkontribusi dan mengambil hati pemerintah, yang pada akhirnya eksekutif perusahaan BUMN tersebut akan mendapatkan penilaian yang baik dari pemerintah, sehingga dapat dipertahankan menjadi direktur utama atau dipromosikan menjadi pimpinan perusahaan pada jenis perusahaan BUMN yang lebih besar (Jian et al., 2012).

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian sebelumnya dari (Adhikari et al., 2006), (Aswadi et al., 2017), (Ajili & Khlif, 2020), dan (Kim & Zang, 2015) yang menemukan bahwa koneksi politik berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak pada perusahaan. Perusahaan yang terhubung secara politik membayar pajak secara signifikan ETR lebih rendah dari perusahaan lain. Hasil penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian (Drope & Hansen, 2009) dan (Ayu et al., 2017) yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh koneksi politik terhadap agresivitas pajak.

Moderasi Diversitas Gender pada Pengaruh Koneksi Politik terhadap Agresivitas Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa diversitas gender tidak dapat memoderasi pengaruh negatif koneksi politik terhadap agresivitas pajak. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa diversitas gender dapat

memperlemah pengaruh koneksi politik terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian ini menentang Teori Gender pandangan bias *alpha* yang menekankan perbedaan antara pria dan wanita. Namun, hasil penelitian mendukung Teori Gender pandangan bias *beta* yang cenderung mengabaikan perbedaan antara pria dan wanita.

Tidak adanya moderasi ini disebabkan karena wanita memiliki kesempatan yang sama dalam melakukan agresivitas pajak. Wanita memiliki kesamaan dengan pria dalam memberikan nasihat terkait pajak yang agresif maupun strategi dalam mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan. Perbedaan gender akan dikesampingkan perusahaan ketika seseorang masuk dan bekerja dalam profesi tertentu di mana perilaku atau keputusan individu tidak ditentukan oleh jenis kelamin mereka. Wanita terlalu disosialisasikan dengan lebih kuat ke dalam profesi dan budaya organisasi, dengan demikian lebih mungkin untuk bertindak sesuai dengan peran pekerjaan, daripada peran gender mereka.

Hal ini didukung dengan penelitian (Bobek et al., 2013) yang mengungkapkan wanita memiliki kemungkinan yang sama dalam memberikan nasihat terkait pajak yang agresif, serta didukung oleh penelitian (Nasution & Jonnergård, 2017) yang menjelaskan bahwa perbedaan gender akan ditolak begitu wanita dan pria memasuki profesi atau pekerjaan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian (Deslandes et al., 2020), (Oyenike & Olayinka, 2016), dan (Ariyanto, 2020) yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan antara wanita dan pria dalam melakukan agresivitas pajak. Hasil penelitian ini tidak membuktikan bahwa wanita dapat mengurangi tindakan agresivitas pajak daripada pria.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Boussaidi & Hamed-Sidhom, 2020), (Damayanti & Supramono, 2019), (Lanis et al., 2017), (Francis et al., 2014), (Hoseini et al., 2019), (Murteira & Proença, 2020), (Riguen et al., 2020), (Khelif & Achek, 2017), (Jarbouli et al., 2020) yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan karakter dan perilaku antara wanita dan pria dalam mempengaruhi tindakan pajak yang agresif.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Koneksi politik dapat meningkatkan pengawasan dalam perusahaan. Perusahaan yang terkoneksi politik memiliki kemungkinan besar untuk dipantau secara ekstensif oleh pembuat kebijakan, pemerintah, media, serta masyarakat. Pengawasan ekstensif ini membuat perusahaan tersebut akan lebih memilih menghindari aktivitas berisiko, seperti agresivitas pajak. Perusahaan yang terkoneksi politik, tidak selalu menggunakan koneksinya dalam hal manajemen pajak yang agresif karena perusahaan lebih memilih berkontribusi kepada negara melalui pembayaran pajak yang semestinya dengan tujuan menjaga citra perusahaan.

Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa diversitas gender tidak dapat memoderasi pengaruh negatif koneksi politik terhadap agresivitas pajak. Diversitas gender tidak dapat mempengaruhi perilaku perusahaan dalam melakukan manajemen pajak yang agresif. Wanita memiliki kemungkinan yang sama dengan pria dalam memberikan nasihat terkait pajak yang agresif. Kesetaraan gender mempengaruhi hasil ini, yang mana perbedaan gender akan ditolak begitu wanita dan pria memasuki profesi atau pekerjaan.

Penelitian ini berkontribusi kepada pemerintah dalam pembuatan regulasi terkait perpajakan dan masukan kepada pemerintah untuk memberikan perhatian pada koneksi politik sebagai celah adanya manajemen pajak yang agresif. Penelitian ini juga berkontribusi bagi perusahaan dalam memberikan pertimbangan untuk menghindari agresivitas pajak karena dapat merusak reputasi perusahaan, serta memberikan masukan pada perusahaan untuk memberikan perhatian pada koneksi politik dan diversitas gender agar tidak menyalahi aturan terkait undang-undang perpajakan.

Keterbatasan

Penelitian ini mempunyai keterbatasan yaitu hanya dilakukan pada perusahaan publik sektor pertambangan di Indonesia tahun 2015-2019 dan hanya menyelidiki diversitas gender sebagai variabel moderasi. Penelitian ini hanya menggunakan 1 *proxy* pengukuran agresivitas pajak berupa *effective tax rate* (ETR), serta pengukuran koneksi politik menggunakan variabel *dummy*.

Saran Untuk Penelitian Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan unit analisis secara lebih luas agar dapat lebih menggeneralisasikan hasil penelitian, serta menggunakan variabel moderasi yang lain, seperti yang dimungkinkan dapat memperlemah atau memperkuat pengaruh koneksi politik terhadap agresivitas pajak. Peneliti selanjutnya juga diharapkan menggunakan pengukuran agresivitas pajak dan koneksi politik lebih secara dalam lagi, yaitu menggunakan *Cash ETR*, *Current ETR*, maupun *Different ETR* sebagai *proxy* pengukuran agresivitas pajak. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan definisi koneksi politik dengan menggunakan metode observasi dan wawancara untuk menemukan pengukuran yang lebih objektif pada koneksi politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhikari, A., Derashid, C., & Zhang, H. (2006). Public policy, political connections, and effective tax rates: Longitudinal evidence from Malaysia. *Journal of Accounting and Public Policy*, 25(5), 574–595. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2006.07.001>
- Ajili, H., & Khelif, H. (2020). Political connections, joint audit and tax avoidance: evidence from Islamic banking industry. *Journal of Financial Crime*, 27(1), 155–171. <https://doi.org/10.1108/JFC-01-2019-0015>
- Ariyanto, D. (2020). Influence of justice, culture and love of money towards ethical perception on tax evasion with gender as moderating variable. *Journal of Money Laundering Control*, 23(1), 245–266. <https://doi.org/10.1108/JMLC-06-2019-0047>
- Aswadi, E., Wahab, A., Ariff, A. M., Marzuki, M. M., Aswadi, E., Wahab, A., Ariff, A. M., Marzuki, M. M., & Penulis, U. (2017). *Ulasan Akuntansi Asia Informasi artikel* :
- Authors, F. (2016). *Accounting Research Journal*.
- Ayu, G., Lestari, W., & Putri, I. G. A. M. A. D. (2017). Pengaruh Corporate Governance, Koneksi Politik, Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 18(3), 2028–2054.
- Bobek, D. D., Hageman, A. M., & Kelliher, C. F. (2013). Analyzing the Role of Social Norms in Tax Compliance Behavior. *Journal of Business Ethics*, 115(3), 451–468. <https://doi.org/10.1007/s10551-012-1390-7>

- Boussaidi, A., & Hamed-Sidhom, M. (2020). Board's characteristics, ownership's nature and corporate tax aggressiveness: new evidence from the Tunisian context. *EuroMed Journal of Business*. <https://doi.org/10.1108/EMJB-04-2020-0030>
- Chaney, P. K., Faccio, M., & Parsley, D. (2011). The quality of accounting information in politically connected firms. *Journal of Accounting and Economics*, 51(1–2), 58–76. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.07.003>
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T. J. (2011). Are Family Firms More Tax Aggressive Than Non-Family Firms? *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1014280>.
- Cheng, Q. (2014). Family firm research- A review. *Journal of Accounting and Research*, 7(3), 149–163
- Chua, C. T., Eun, C. S., & Lai, S. (2007). Corporate valuation around the world: The effects of governance, growth, and openness. *Journal of Banking and Finance*, 31(1), 35–56. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2006.02.002>
- Damayanti, T. W., & Supramono, S. (2019). Women in control and tax compliance. *Gender in Management*, 34(6), 444–464. <https://doi.org/10.1108/GM-06-2018-0071>
- Davis, A. K., Guenther, D. A., Krull, L. K., & Williams, B. M. (2016). Do socially responsible firms pay more taxes? *Accounting Review*, 91(1), 47–68. <https://doi.org/10.2308/accr-51224>
- Deslandes, M., Fortin, A., & Landry, S. (2020). Audit committee characteristics and tax aggressiveness. *Managerial Auditing Journal*, 35(2), 272–293. <https://doi.org/10.1108/MAJ-12-2018-2109>
- Do, Q., Lee, Y. T., & Nguyen, B. D. (2015). *Institutional Knowledge at Singapore Management University Political connections and firm value : Evidence from the regression discontinuity design of close gubernatorial elections Political Connections and Firm Value : Evidence from the Regression Discon.*
- Drope, J. M., & Hansen, W. L. (2009). Futility and free-riding: Corporate political participation and taxation rates in the United States. *Business and Politics*, 10(3). <https://doi.org/10.2202/1469-3569.1238>
- Faccio, M. (2006). Politically connected firms. *American Economic Review*, 96(1), 369–386. <https://doi.org/10.1257/000282806776157704>
- Faccio, M. (2011). Differences between Politically Connected and Non-Connected Firms: A Cross Country Analysis. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.918244>
- Faccio, M. (2016). Discussion of “Corporate Political Connections and Tax Aggressiveness.” *Contemporary Accounting Research*, 33(1), 115–120. <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12214>
- Fajri, A. (2019). Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2016 -2018). *Accounting Department, Faculty of Economics and Business Brawijaya University*, 1–18.
- Fisman, R. (2001). American Economic Association Estimating the Value of Political Connections. *Source: The American Economic Review*, 91(4), 1095–1102.
- Francis, B. B., Hasan, I., Wu, Q., & Yan, M. (2014). Are female CFOs less tax aggressive? Evidence from tax aggressiveness. *Journal of the American Taxation Association*, 36(2), 171–202. <https://doi.org/10.2308/atax-50819>
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting*

- and Economics*, 50(2–3), 127–178. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002>
- Hijriani, A. N., Latifah, S. W., & Setyawan, S. (2017). Pengaruh Koneksi Politik, Dewan Komisaris dan Karakteristik Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (Perusahaan BUMN Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 525–534. <https://doi.org/10.22219/jrak.v4i1.4924>
- Honaker, K., & Thomas, P. B. (2019). An Analysis of the Initial Financial Statement Impact of the Tax Cuts and Jobs Act. *The CPA Journal*, 89(2), 56-65.
- Hoseini, M., Safari Gerayli, M., & Valiyan, H. (2019). Demographic characteristics of the board of directors' structure and tax avoidance: Evidence from Tehran Stock Exchange. *International Journal of Social Economics*, 46(2), 199–212. <https://doi.org/10.1108/IJSE-11-2017-0507>
- Jarboui, A., Kachouri Ben Saad, M., & Riguen, R. (2020). Tax avoidance: do board gender diversity and sustainability performance make a difference? *Journal of Financial Crime*, 27(4), 1389–1408. <https://doi.org/10.1108/JFC-09-2019-0122>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of financial economics*, 3(4), 305-360.
- Jian, M., Li, W., & Zhang, H. (2012). How does state ownership affect tax avoidance? Evidence from China. In *School of Accountancy: Singapore Management University*.
- Khlif, H., & Achek, I. (2017). Gender in accounting research: a review. *Managerial Auditing Journal*, 32(6), 627–655. <https://doi.org/10.1108/MAJ-02-2016-1319>
- Kim, C., & Zhang, L. (2016). Corporate political connections and tax aggressiveness. *Contemporary Accounting Research*, 33(1), 78-114.
- Lanis, R., Richardson, G., & Taylor, G. (2017). Board of Director Gender and Corporate Tax Aggressiveness: An Empirical Analysis. *Journal of Business Ethics*, 144(3), 577–596. <https://doi.org/10.1007/s10551-015-2815-x>
- Lee, B. B., Dobiyaniski, A., & Minton, S. (2015). Theories and Empirical Proxies for Corporate Tax Avoidance. *The Journal of Applied Business and Economics*, 17(3), 21–34. <https://www.proquest.com/scholarly-journals/theories-empirical-proxies-corporate-tax/docview/1727644636/se-2?accountid=62100>
- Li, C., Y. Wang, L. Wu, & J. Z. Xiao. 2016. "Political Connections and Tax Induced Earnings Management: Evidence from China. *European Journal of Finance*." Vol. 22. 4-6.
- Mohanadas, N. D., Abdullah Salim, A. S., & Pheng, L. K. (2019). CSR and tax aggressiveness of Malaysian listed companies: evidence from an emerging economy. *Social Responsibility Journal*, 16(5), 597–612. <https://doi.org/10.1108/SRJ-01-2019-0021>
- Murteira, J., & Proença, C. (2020). *Political connections and banking performance : the moderating effect of gender diversity*. June. <https://doi.org/10.1108/CG-01-2020-0018>
- Muttakin, M. B., Monem, R. M., Khan, A., & Subramaniam, N. (2015). Family firms, firm performance and political connections: Evidence from Bangladesh. *Journal of Contemporary Accounting and Economics*, 11(3), 215–230. <https://doi.org/10.1016/j.jcae.2015.09.001>
- Nasution, D., & Jonnergård, K. (2017). Do auditor and CFO gender matter to earnings quality? Evidence from Sweden. *Gender in Management*, 32(5), 330–351. <https://doi.org/10.1108/GM-06-2016-0125>

- Nurisdianto, W.E. (2019). How crucial is the tax in the portal of national and state life
- Nurrahmi, A. D., & Rahayu, S. (2020). Pengaruh Strategi Bisnis, Transfer Pricing, dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *JAE (Jurnal Akuntansi & Ekonomi)*, 5(2), 48–57.
- Oyenike, O., & Olayinka, E. (2016). *Female Directors and Tax Aggressiveness of Pranoto Listed Banks in Nigeria*. 293–299.
- Pohan, Chairil Anwar. 2011. *Optimizing Corporate Tax Management: Kajian Perpajakan dan Tax Planning-nya*. Terkini Edisi 1. Jakarta: Bumi Aksara
- Pranoto, B. A., Negeri, U., Maret, S., Negeri, U., & Maret, S. (2013). Pengaruh Koneksi Politik Dan Corporate Governance Terhadap Audit Fee. *Diponegoro Journal of Accounting*, 0(0), 344–359.
- Preuss, L. (2010). Tax avoidance and corporate social responsibility: You can't do both, or can you? *Corporate Governance*, 10(4), 365–374. <https://doi.org/10.1108/14720701011069605>
- Riguen, R., Salhi, B., & Jarboui, A. (2020). Do women in board represent less corporate tax avoidance? A moderation analysis. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 40(1–2), 114–132. <https://doi.org/10.1108/IJSSP-10-2019-0211>
- Suyanto, S. (2021). The Effect of Bad Credit and Liquidity on Bank Performance in Indonesia. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(3), 451–458.
- Tingting Ying, Brian Wright, W. H. (2016). *Ownership Structure and Tax Aggressiveness of Chinese Listed Companies Article information :*
- Welsh, M. J. (1992). The Construction of Gender: Some Insights from Feminist Psychology. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 5(3), 120–132. <https://doi.org/10.1108/09513579210017433>
- Yuliawati (2019) Gelombang Penghindaran Pajak dalam Pasaran Batu Bara artikel www.katadata.co.id.

Journal Profile

Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi

eISSN : 24429708 | pISSN : 24429708

Economy

Universitas Trisakti



S2

Sinta Score



GARUDA

Indexed by

GARUDA

22

H-Index

20

H5-Index

2143

Citations

1540

5 Year

Citations



Penerbit:

Lembaga

Penerbit

Fakultas

Ekonomi

Universitas

Trisakti

[Website I](#)[Editor URL](#)

Address:

Gedung

Hendriawan Sie

Lantai 3, Jalan

Kyai Tapa Grogol

no. 1 Grogol,

Jakarta 11440

Jakarta

Email:

erlianabanjarnahore@gmail.com

Phone:

021-

2019

2020

2021

Citation Statistics

Accreditations

Search..



1

2

3

4

5



Page 1 of 34 | Total Records : 340

Publications

Citation

Tinjauan Terhadap Kompetensi dan Independensi Akuntan Publik: Refleksi Atas Skandal Keuangan HS Lastanti 157
Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi 5 (1), 85-97

Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pendanaan perusahaan: Pengujian pecking order hyphotesis 105
S Mayangsari
Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi 1 (3), 1-26

Faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay dan timeliness 97
Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi 5 (3), 271-287

5663232(ext.8334)

Last Updated :

2021-12-04

<u>Studi Empiris Terhadap Faktor Penentu Kebijakan Jumlah Dividen</u> M Suherli, SS Harahap Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi 4 (3), 223-245	86
<u>Pengaruh Faktor Klien Dan Faktor Auditor Terhadap Ap Auditor Changes Sebuah Pendekatan Dengan Model Kontijensi Rpa (Recursive Model Alogarithm)</u> AA Mardiyah Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi 3 (2), 133-154	76
<u>Pengaruh faktor fundamental dan risiko sistematis terhadap return saham syariah</u> DBP Supadi, MN Amin Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi 12 (1), 23-44	64
<u>Pengaruh Efektivitas Dewan Komisaris Dan Komite Audit, Struktur Kepemilikan, Dan Kualitas Audit Terhadap Manajemen Laba</u> E Lestari, M Murtanto Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi 17 (2), 97-116	54
<u>Pengaruh struktur kepemilikan, leverage, profitabilitas dan kebijakan dividen terhadap manajemen laba dengan kualitas audit sebagai variabel moderasi</u> AD Hasty, V Herawaty Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi 17 (1), 1-16	53
<u>Pengaruh kinerja keuangan perusahaan manufaktur terhadap return saham di bursa efek Indonesia</u> J Ganto, M Khadafi, W Albra, G Syamni Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi 8 (1), 85-96	45
<u>Pengaruh financial distress, pergantian manajemen dan ukuran kap terhadap auditor switching</u> JI Manto, DL Wanda Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi 18 (2),	44

205-224

Page 1 of 34 | Total Records : 340



Copyright © 2017
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi
*(The Ministry of Education, Culture, Research,
and Technology)*

All Rights Reserved.

Artikel Abidah, Syafiq, dan Wahyu_MRAAI 2021

by Wahyu Widarjo

Submission date: 12-Dec-2021 10:30AM (UTC+0700)

Submission ID: 1727889764

File name: 11._Artikel_Abidah,_Syafik_dan_Wahyu_2021.pdf (212.27K)

Word count: 6346

Character count: 40981

POLITICAL CONNECTIONS AND TAX AGGRESSIVENESS: THE ROLE OF GENDER DIVERSITY AS A MODERATING VARIABLE

Abidah Dwi Rahmi Satiti¹

Mohammad Syafik²

Wahyu Widarjo³

^{1,2} Universitas Sebelas Maret; Universitas Islam Lamongan

³ Universitas Sebelas Maret

*abidahdwirahmi@student.uns.ac.id

Abstract

31
Aggressive tax management actions lead to a low tax ratio in Indonesia. The purpose of this study was to determine the effect of political connections on tax aggressiveness and to determine the moderation of management gender diversity on the effect of political connections on tax aggressiveness. This research is a type of quantitative research using moderated regression analysis using STATA software. The dependent variable of this study is tax aggressiveness, the independent variable is political connections and the moderating variable is management gender diversity. The sample of this research is the mining sector companies listed on the IDX during the 2015-2019 period. Secondary data is obtained based on the annual financial statements that are on the IDX. The findings show that political connections have a negative effect on tax aggressiveness and management gender diversity cannot moderate the negative effect of political connections on tax aggressiveness. This research has implications for the government in making regulations related to taxation and input to the government to pay attention to political connections as a gap in aggressive tax management. This research also contributes to companies in giving consideration to avoiding tax aggressiveness because it can damage the company's reputation, as well as providing input to companies to pay attention to the existence of political connections and management gender diversity.

Keywords: Gender Diversity; Political Connections; Tax Aggressiveness.

Abstrak

55
Tindakan manajemen pajak agresif menyebabkan rendahnya tax ratio di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh koneksi politik terhadap agresivitas pajak dan mengetahui moderasi diversitas gender manajemen pada pengaruh koneksi politik terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif menggunakan analisis regresi moderasi menggunakan Software STATA. Variabel dependen penelitian ini agresivitas pajak, variabel independen koneksi politik dan variabel moderasi diversitas gender manajemen. Sampel penelitian ini perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI selama periode 2015-2019. Data sekunder diperoleh berdasarkan laporan keuangan tahunan yang berada pada BEI. Penelitian

ini memberikan keunggulan karena meneliti variabel moderasi diversitas gender manajemen dalam mengetahui perannya pada pengaruh koneksi politik terhadap agresivitas pajak, yang masih jarang diteliti pada penelitian sebelumnya. Temuan menunjukkan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak dan diversitas gender manajemen tidak memoderasi pengaruh negatif koneksi politik terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini memberikan implikasi pada pemerintah dalam pembuatan regulasi terkait perpajakan dan masukan kepada pemerintah untuk memberikan perhatian pada koneksi politik sebagai celah adanya manajemen pajak yang agresif. Penelitian ini juga berkontribusi bagi perusahaan dalam memberikan pertimbangan untuk menghindari agresivitas pajak karena dapat merusak reputasi perusahaan, serta memberikan masukan pada perusahaan untuk memberikan perhatian pada keberadaan koneksi politik serta diversitas gender manajemen.

Kata kunci : agresivitas pajak; diversitas gender; koneksi politik

JEL Classification : M41, H26, H32, J16, G3.

Submission date: July 2021

Accepted date: September 2021

**Corresponding Author*

PENDAHULUAN

Pendapatan dari sektor perpajakan merupakan salah satu dari kontribusi pendapatan utama bagi Indonesia. Tahun 2019 kontribusi tersebut mencapai 82,5% dari total penerimaan nasional. Hal ini berarti pemerintah sangat bergantung pada penerimaan perpajakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat (Nurisdianto, 2019). Namun, sampai saat ini, permasalahan yang terjadi di Indonesia adalah rendahnya *tax ratio*. Penerimaan pajak tidak pernah lagi mencapai target sejak tahun 2008. Tahun 2020 merupakan tahun ke-12 Indonesia mengalami *shortfall* pajak (Suyanto, 2021).

Beberapa kasus terkait pajak di Indonesia antara lain adalah kasus pajak dari PT Adaro Energy Tbk. Kasus tersebut dilakukan melalui *transfer pricing* dalam salah satu anak perusahaan di Singapore. Tercatat dalam Global Witness tahun 2009 hingga 2017, Batu bara di Indonesia telah terjual oleh PT Adaro (lebih dari 70%) dengan *low price* ke Coaltrade, lalu terjual kembali oleh anak perusahaan tersebut dengan *high price*. Kesempatan ini diambil oleh Coaltrade untuk mendapatkan keuntungan dan membukukannya di Singapore yang memiliki *tax rate* lebih rendah daripada Indonesia. Selanjutnya, keuntungan dialihkan ke Mauritius, yaitu negara yang tidak memiliki *tax rate* (Thomas, 2019). Kasus pajak pertambangan lain yang terjadi adalah gugatan Direktorat Jenderal Pajak terhadap perusahaan PT Multi Sarana Avindo atas perpindahan kuasa tambang melalui penurunan nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang wajib dibayarkan. DJP menggugat sebanyak 3 kali dengan nominal 7,7 miliar (Yuliawati, 2019). Kasus serupa juga dilakukan oleh PT Asian Agri atas usaha penggelapan pajak yang dilakukan tahun 2007 (Thomas, 2019).

Praktik agresivitas pajak menjadi penyebab rendahnya *tax ratio* di Indonesia (Thomas, 2019). Perusahaan memiliki beberapa strategi dan pilihan untuk mengejar tarif pajak yang lebih rendah (Drope & Hansen, 2009). Agresivitas pajak memberikan celah bagi manajemen perusahaan dalam mencari kesempatan untuk memperoleh

keuntungan jangka pendek, dan tidak sesuai dengan harapan pemegang saham dalam jangka panjang (Tingting Ying, Brian Wright, 2016). Praktik agresivitas pajak mencari celah kelemahan - kelemahan perundang-undangan pajak yang tidak bertentangan dengan hukum. Istilah agresivitas pajak dapat digunakan bergantian dengan istilah penghindaran pajak (Chen et al., 2011). Skema agresivitas pajak berada pada *grey area*, yakni cenderung mencari peluang pada kelemahan - kelemahan perundang-undangan tersebut dalam menurunkan jumlah pajak yang dibayarkan (Pohan 2011). Namun, jika suatu perusahaan dicurigai melakukan pajak agresif, perusahaan tersebut dapat menanggung beban reputasi biaya. Agresivitas pajak merupakan tindakan beresiko yang berdampak pada pembayaran denda dan mengancam reputasi perusahaan (Chen et al., 2011). Media massa populer sering memberikan pandangan negatif terhadap perusahaan dengan posisi pajak yang agresif (Nasuti²¹ & Jonnergård, 2017).

Agresivitas pajak dapat dipengaruhi oleh koneksi politik. Perusahaan yang terkoneksi politik mempunyai *leverage* yang lebih tinggi, membayar pajak lebih rendah, serta memiliki kekuatan pasar yang lebih kuat (Faccio, 2011). Ada beberapa alasan perusahaan membina koneksi politik, di antaranya, *pertama*, perusahaan yang terkoneksi politik memiliki risiko yang lebih rendah karena mereka dilindungi oleh koneksi ke politisi. *Kedua*, Perusahaan yang terkoneksi politik mampu mengakses informasi lebih cepat mengenai peraturan dan penegakan pajak, yang memungkinkan mereka lebih kompleks dalam berstrategi. *Ketiga*, perusahaan memiliki lebih sedikit tekanan pasar untuk transparan. *Keempat*, koneksi politik dapat mengurangi biaya politik menjadi agresivitas pajak. *Kelima*, koneksi politik dapat dikaitkan dengan tingkat agresivitas pajak yang lebih tinggi karena berdampak dari pengambilan risiko mereka (Kim & Zang, 2016). Lobi pajak juga dilakukan perusahaan sebagai upaya melakukan agresivitas pajak (Davis et al., 2016).

Perusahaan yang terkoneksi politik mendapat manfaat dari koneksi mereka, terutama di negara-negara⁵¹ dengan tingkat korupsi yang lebih tinggi (Faccio, 2006). Koneksi politik juga lebih sering dilakukan di negara-negara berkembang daripada di negara maju (Chua et al., 2007). Di Indonesia, koneksi politik umumnya dilakukan dengan menempatkan orang yang mempunyai kedekatan dengan pemerintah ke dalam struktur organisasi perusahaan, baik komisaris maupun direksi. Salah satu fenomena di Indonesia, tokoh politik yang ada di dalam PT. Adaro Energy, yang menjabat sebagai salah satu pemegang saham di dalam perusahaan dan juga menduduki jabatan di sebuah partai politik tokoh nasional Sandiaga Salahudin Uno yang juga menjabat sebagai wakil dewan Pembina Partai Gerindra (Fajri, 2019).

Perkembangan penelitian terkait pengaruh koneksi politik terhadap agresivitas pajak di berbagai negara memiliki hasil yang beragam. Di Amerika Serikat, di¹³ temukan bahwa perusahaan yang terkoneksi secara politik lebih agresif terhadap pajak daripada perusahaan yang tidak terkoneksi politik (Kim & Zang, ³⁶6). Penelitian pada perusahaan perbankan syariah di Cina mendapatkan hasil bahwa koneksi politik berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak (A³⁶i & Khlif, 2020). Sebuah studi dari (Faccio, 2011) menemukan terdapat hubungan antara koneksi politik dan tarif pajak yang efektif untuk sampel perusahaan internasional dari 47 negara. Koneksi politik salah satu faktor signifikan yang mempengaruhi agresivitas pajak pada perusahaan AS (Do et al., 2015). Terdapat pengaruh positif antara lobi pajak dengan agresivitas pajak (Davis et al., 2016). Di penelitian lain, hanya ditemukan hubungan lemah antara lobi dan tarif pajak perusahaan, dan tidak ada hubungan sistematis pada sampel Fortune 500 atau Fortune 1000 terbesar perusahaan Amerika Serikat (Drope & Hansen, 2009).

Penelitian di China, menemukan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Perusahaan BUMN lebih memilih membayar pajak dengan jumlah yang tinggi tanpa menggunakan koneksi politik yang dimilikinya (Jian et al., 2012).

Hasil penelitian lain yang meneliti hubungan antara koneksi politik dan agresivitas pajak di negara berkembang antara lain (Adhikari et al., 2006) memberikan bukti bahwa perusahaan Malaysia dengan koneksi politik membayar tarif pajak efektif yang signifikan jauh lebih rendah daripada yang tidak memiliki koneksi politik. Dalam konteks yang sama, (Aswadi et al., 2017) memeriksa hubungan antara koneksi politik dan agresivitas pajak perusahaan di Malaysia dan perusahaan yang terkoneksi secara politik lebih agresif terhadap pajak daripada tidak terkoneksi politik.

Penelitian di Indonesia juga memberikan hasil yang beragam. Koneksi politik berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (Fajri, 2019). Penelitian pada perusahaan BUMN menunjukkan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Perusahaan BUMN akan berusaha untuk membayar pajak besar kepada pemerintah untuk memberikan kontribusi kepada negara yang pada akhirnya membuat direktur utama tersebut tetap dipertahankan menjadi direktur utama atau promosi ke perusahaan BUMN yang lebih besar serta mempertegas legitimasi politiknya (Anoto et al., 2013). Berbeda dengan hasil tersebut, ditemukan pula penelitian yang menyatakan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Perusahaan yang sahamnya sebagian besar dikuasai oleh pemerintah ditetapkan sebagai wajib pajak yang memiliki resiko rendah. Perusahaan akan menjaga citra yang baik agar keberlangsungan usahanya dapat terjamin (Ayot et al., 2017). Hasil ini juga sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa perusahaan BUMN merupakan perusahaan yang dimiliki negara, sehingga lebih diawasi oleh negara (Hijriani et al., 2017).

Faktor lain yang dianggap dapat memoderasi pengaruh koneksi politik terhadap agresivitas pajak adalah diversitas gender. Kehadiran wanita di dewan direksi mengurangi agresivitas pajak perusahaan (Hoseini et al., 2019), (Lanis et al., 2017) (Damayanti & Supramono, 2019), (Murteira & Proença, 2020), dan (Authors, 2016). Tingkat penghindaran pajak menurun ketika jumlah wanita pada dewan meningkat (Jarboui et al., 2020). Kehadiran wanita di dewan perusahaan mampu mengatur secara signifikan tingkat manajemen perilaku keterlibatan dalam praktik agresivitas pajak dan mengurangi keseluruhan risiko dalam hal stabilitas posisi pajak (Boussaidi & Hamed-Sidhom, 2020). Pengaruh gender pada konservatisme akuntansi dan manajemen laba didasarkan pada fakta bahwa perbedaan gender dalam sikap terhadap risiko mendukung gagasan bahwa wanita lebih menghindari risiko daripada pria (Francis et al., 2014). Literatur akuntansi gender selama periode 1994-2016, menunjukkan bahwa keberadaan wanita di dewan, komite audit, CFO atau CEO mengarah pada pelaporan yang lebih konservatif, tingkat pengungkapan sosial dan lingkungan yang lebih tinggi dan agresivitas pajak yang lebih rendah (Khlif & Achek, 2017).

Hasil penelitian yang berbeda juga ditemukan. Pria dan wanita memiliki kemungkinan yang sama untuk melakukan pajak yang agresif (Bek et al., 2013). Pria dan wanita sama-sama cenderung memberikan nasihat terkait agresivitas pajak. Tidak ada pengaruh signifikan direktur wanita terhadap agresivitas pajak setelah mengendalikan karakteristik perusahaan dan mekanisme tata kelola (Oyenike & Olayinka, 2016). Tidak ditemukan peran diversitas gender dalam agresivitas pajak karena perbedaan gender akan ditolak begitu wanita dan pria memasuki profesi atau pekerjaan tertentu (Nasution & Jonnergård, 2017). Diversitas gender tidak memiliki

interaksi dengan keadilan, budaya dan cinta uang atau terhadap persepsi etis tentang penghindaran pajak (Ariyanto, 2020).

Peneliti berharap dengan melakukan penelitian terkait variabel agresivitas pajak, koneksi politik, dan diversitas gender akan mampu berperan serta dalam menuntaskan kasus-kasus terkait agresivitas pajak. Dengan rendahnya agresivitas pajak, maka akan meningkatkan tingginya *tax ratio* di Indonesia. Pembaruan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini menyelidiki pengaruh koneksi politik terhadap agresivitas pajak dengan menggunakan variabel moderasi diversitas gender, yang mana belum pernah dilakukan penelitian yang melihat pengaruh tersebut dari sisi diversitas gender. Selain itu, penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor pertambangan di Indonesia. Sektor tambang merupakan sektor primadona yang memberikan kontribusi besar pada pendapatan negara, tetapi juga terdapat beberapa kasus-kasus perpajakan yang berasal dari sektor ini. Penelitian ini berkontribusi kepada pemerintah dalam pembuatan regulasi terkait perpajakan dan masukan kepada pemerintah untuk memberikan perhatian pada koneksi politik dan diversitas gender sebagai celah melakukan agresivitas pajak. Penelitian ini juga berkontribusi bagi perusahaan dalam memberikan pertimbangan untuk menghindari agresivitas pajak karena dapat merusak reputasi perusahaan serta mempertimbangkan diversitas gender dalam jabatan dewan.

57 REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS

Teori Agensi

Teori agensi muncul akibat adanya penyerahan wewenang dari principal kepada agen dalam menjalankan operasional perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). Prinsipal adalah pemegang saham atau investor, sedangkan agen adalah manajemen yang mengelola perusahaan atau manajer. Inti dari hubungan keagenan adalah pemisahan fungsi antara kepemilikan di investor dan pengendalian di pihak manajemen. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa teori agensi menjelaskan adanya konflik yang akan timbul antara pemilik dan manajemen perusahaan. Adanya pemisahan antara pemilik dengan manajemen perusahaan dapat menimbulkan masalah, antara lain yaitu adanya kemungkinan manajer melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan keinginan atau kepentingan prinsipal.

Kaitannya dengan penelitian ini bahwa teori agensi yang muncul akibat adanya perbedaan kepentingan antara pihak pemilik yang mengharapkan kinerja perusahaan yang baik agar tingkat pengembalian yang semakin tinggi dengan manajemen yang memiliki kepentingan sendiri dari bonus. Perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen dapat memengaruhi berbagai hal menyangkut kinerja perusahaan salah satunya kebijakan perusahaan terkait pajak. Manajer sebagai agen mempunyai kepentingan untuk memperoleh kompensasi atau insentif sebesar-besarnya melalui laba yang tinggi atas kinerjanya dan pemegang saham ingin menekan pajak yang dibayarkan melalui laba yang rendah.

Political Favoritism Effect dan Bureaucratic Incentive Effect

Political Favoritism Effect adalah suatu kondisi dimana *political connection* berpengaruh pada semakin tingginya agresivitas pajak. (Ajili & Khlif, 2020) mengemukakan bahwa koneksi politik berhubungan dengan agresivitas pajak. Semakin baik kemampuan manajer dalam melobi pemerintah, maka tingkat agresivitas pajaknya

akan semakin tinggi. Dengan terkoneksi secara politik, maka perusahaan akan merasa terlindungi oleh pemerintah maupun politisi dan memiliki akses pada informasi pajak preferensial.

Perusahaan yang terkoneksi politik memiliki keuntungan dari risiko deteksi yang lebih rendah, akses ke informasi mengenai perubahan pajak, rasa berpuas diri menjadi kurang transparan, dan sifatnya dari aktivitas berbasis risiko (Faccio, 2016). Keuntungan-keuntungan dari koneksi politik tersebut mengakibatkan perusahaan dengan mudah melakukan agresivitas pajak (Aswadi et al., 2017). Semakin baik kemampuan manajer dalam melobi pemerintah, maka tingkat agresivitas pajaknya akan semakin tinggi. Dengan terkoneksi secara politik, maka perusahaan akan merasa terlindungi oleh pemerintah maupun politisi dan memiliki akses pada informasi pajak preferensial. Perusahaan yang terkoneksi politik memiliki keuntungan dari risiko deteksi yang lebih rendah, akses ke informasi mengenai perubahan pajak, menjadi kurang transparan, dan cenderung melakukan aktivitas berbasis risiko.

Bureaucratic Incentive Effect adalah kondisi ketika *political connection* berdampak pada semakin rendahnya tindakan agresivitas pajak. Koneksi politik dapat meningkatkan pengawasan dalam perusahaan. Perusahaan yang membina suatu koneksi politik memiliki kemungkinan besar untuk dipantau secara ekstensif oleh pembuat kebijakan, pemerintah, media, serta masyarakat. Pengawasan ekstensif ini membuat perusahaan tersebut akan lebih memilih menghindari aktivitas berisiko, seperti agresivitas pajak.

Agresivitas Pajak

Pajak (*tax*) diartikan sebagai pengeluaran perusahaan yang signifikan yang dikenakan pada penghasilan perusahaan, dengan cara mengurangi laba bersih yang diterima oleh entitas serta pemegang saham (Chen et al., 2011). Pajak menjadi kontribusi penting dari perusahaan kepada masyarakat (Preuss, 2010). (Hanlon & Heitzman, 2010) mengartikan agresivitas pajak adalah menurunnya nilai pajak secara eksplisit yang dilakukan dengan teknik penghematan pajak secara legal hingga ilegal oleh pihak yang berwenang atas itu. Klasifikasi legal maupun ilegal ini belum jelas pemisahannya, sehingga penentuannya ditentukan oleh otoritas pajak setelah tindakan agresivitas pajak itu terjadi (Lee et al., 2015). Istilah agresivitas pajak dapat digunakan bergantian dengan istilah penghindaran pajak (Chen et al., 2011).

Strategi dari tindakan agresivitas pajak berada di wilayah abu-abu, yaitu kecenderungan mencari celah pada kelemahan - kelemahan perundang-undangan dan aturan perpajakan dengan cara mengurangi wajib pajak yang harus dibayarkan. Realisasinya, tak ada unsur pidana dari tindakan agresivitas pajak karena entitas telah melakukan tindakan transaksi secara benar dan menyertakan bukti yang akurat serta tidak melanggar ketentuan atau aturan yang ditetapkan. Akan tetapi, yang dikhawatirkan jika perusahaan terlalu agresif dalam menghindari pajak, maka terdapat potensi perusahaan melakukannya dengan cara ilegal yang bertentangan dengan undang-undang (Mohanadas et al., 2019). Jika perusahaan terbukti melakukan tindakan ilegal, otoritas pajak dapat menjatuhkan sanksi berat terhadap perusahaan. Sanksi tersebut berpotensi menghitamkan nama baik perusahaan, terutama di hadapan para pemangku kepentingan (Nasution & Jonnergård, 2017), (Chen et al., 2011).

Koneksi Politik

Koneksi politik sering dikaitkan pada hubungan politik entitas dengan pemerintah. Entitas dianggap terkoneksi politik jika seorang *manager*, *shareholder* mayoritas, *shareholder* blok atau kerabat dekat sebelumnya, sedang, maupun pernah memiliki suatu jabatan dalam parlemen, petinggi negara, atau partai perwakilan parlemen, dikecualikan Tentara Nasional Indonesia dan kepolisian (Faccio, 2006). *Political connection* bertujuan untuk meningkatkan *bargaining power* dan posisi entitas pada pemerintahan (Cheng, 2014). Koneksi politik dilakukan melalui penempatan kedekatan dewan komisaris, direksi, maupun struktur organisasi entitas dengan pemerintah (Fisman, 2001).

Political connection berpengaruh terhadap agresivitas pajak (Ajili & Khlif, 2020), (Aswadi et al., 2017), (Faccio, 2016), (Adhikari et al., 2006). Koneksi politik dijadikan sebagai cara perusahaan untuk mengetahui dengan lebih baik kapan perencanaan pajak agresif kemungkinan besar ditoleransi (Ajili dan Khlif, 2020). Perusahaan yang terkoneksi politik memiliki keuntungan dari risiko deteksi, akses ke informasi mengenai perubahan pajak, kepuasan diri karena kurang transparan, dan dalam sifat aktivitas berbasis risiko, kami memprediksi hubungan positif antara koneksi politik dan agresivitas pajak perusahaan yang terkoneksi politik dapat melindungi perusahaan dari deteksi dan risiko litigasi di masa depan (Kim & Zhang, 2015). Perusahaan dengan memiliki hubungan politik dengan pemerintah berarti memungkinkan perusahaan untuk mengakses informasi mengenai perubahan masa depan dalam peraturan perpajakan dan memungkinkan eksplorasi perbedaan deret waktu yang lebih baik dalam undang-undang perpajakan atau penegakan pajak menggunakan strategi perpajakan yang kompleks (Aswadi et al., 2017).

Perusahaan yang terkoneksi politik akan menggunakan kedekatannya dengan politisi dan pemerintah untuk memperoleh manfaat di pasar dan menghindari kemungkinan terkena hukuman dari kegiatan ekspropriasi dan manajemen yang buruk (Muttakin et al., 2015). Koneksi politik dapat menurunkan kemungkinan deteksi (misalnya tempat penampungan pajak ilegal) dan/atau menurunkan denda jika terdeteksi melakukan agresivitas pajak (Faccio, 2016). Tindakan manajemen pajak agresif yang terlalu berat yang terdeteksi oleh pengawas dan otoritas pajak akan berakibat pada jatuhnya reputasi perusahaan, di sisi lain upaya penghindaran pajak tersebut akan optimal jika manajer memiliki kemampuan dalam berkoneksi politik. Penghindaran pajak akan optimal jika perusahaan mampu menurunkan beban pajak dan menghindari hukuman melalui adanya koneksi politik (Li, 2016).

H₁: Koneksi Politik berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak

Diversitas Gender

Teori gender dapat dikategorikan ke dalam dua pandangan bersaing yang biasa disebut *alpha* dan *beta*. Bias *alpha* cenderung memperburuk perbedaan gender, sedangkan bias *beta* cenderung mengabaikannya. Bias *alpha* menekankan perbedaan antara pria dan wanita. Hal ini menunjukkan bahwa wanita bersifat emosional dibandingkan dengan pria yang berakal (Wels, 1992).

Keberadaan wanita di jajaran dewan dinilai dengan sikap kehati-hatian yang tinggi, teliti dan cenderung menghindari resiko dibandingkan dengan pria. Selain itu, wanita memiliki standar etika dan moral yang lebih tinggi, menunjukkan sikap pemikiran independen yang lebih baik, dan memfasilitasi keputusan yang lebih tepat yang meningkatkan tingkat transparansi di tingkat dewan, dan meningkatkan tingkat

kepercayaan dewan. Kehadiran wanita pada dewan direksi dapat secara signifikan mengurangi kemungkinan agresivitas pajak (Lanis et al., 2017), (Hoseini et al., 2019). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat penghindaran pajak menurun ketika tingkat wanita di dewan meningkat (Jarbouli et al., 2020).

Kehadiran manajer puncak dan pemilik wanita dalam perusahaan dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Wanita memiliki sifat lebih transparan. Direktur wanita meningkatkan efisiensi fungsi pemantauan dewan (Riguen et al., 2020). Bahkan, mereka memiliki kecenderungan kuat untuk mempekerjakan auditor berkualitas tinggi untuk melindungi reputasi mereka. Karakteristik wanita memberikan perhatian etis yang lebih besar dan penghindaran resiko, membantu mengurangi pengaruh negatif koneksi politik pada tindakan-tindakan beresiko, serta menjaga kepentingan lembaga dari pengaruh buruk dari pribadi (Murteira & Proença, 2020). Kehadiran ini mewakili *capital asset* yang lebih fokus pada tata kelola lebih baik dan reputasi jangka panjang, serta mengurangi kemungkinan masalah terkait risiko, seperti manajemen laba dan penghindaran pajak (Damayanti & Supramono, 2019).

Diversitas gender pada konservatisme akuntansi dan manajemen laba didasarkan pada fakta bahwa perbedaan gender dalam sikap terhadap risiko mendukung gagasan bahwa wanita lebih menghindari risiko daripada pria. Wanita lebih berhati-hati daripada pria dalam pengakuan dan pengukuran pendapatan dan aset dan menggunakan kontrol yang lebih tinggi dari kabar baik daripada kabar buruk (Francis et al., 2014). Para wanita di dewan cenderung mengurangi risiko laporan keuangan yang dimanipulasi, karena wanita lebih cenderung ke arah kejujuran, kehati-hatian, dan konservatisme (Riguen et al., 2020). Representasi wanita pada dewan, komite audit, CFO atau CEO menga¹⁵ pada pelaporan yang lebih konservatif, tingkat pengungkapan sosial dan lingkungan yang lebih tinggi, dan agresivitas pajak yang lebih rendah (Khlif & Achek, 2017).

H₂: Diversitas gender memperlemah pengaruh positif koneksi politik terhadap agresivitas pajak

METODE PENELITIAN

Sampe¹⁶an Data

Jenis penelitian ini kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Penelitian ini menganalisis perusahaan pada sektor pertambangan di BEI tahun 2015-2019. Pemilihan sektor pertambangan masih menjadi sektor primadona yang mana harga komoditas pertambangan mengalami kenaikan harga yang terus bergerak, serta pada sektor pertambangan ditemukan beberapa kasus terkait pajak.

³⁹ Sampel penelitian diambil melalui *purposive sampling*, menggunakan *criteria*: (1) perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019; (2) tidak *delisting* pada waktu observasi penelitian; (3) menerbitkan *annual report* serta laporan keuangan berkala tahun 2015-2019 dan telah mempublikasikan laporan keuangan di situs perusahaan dan atau situs BEI ; (4) perusahaan yang melaporkan laba dan beban pajak penghasilan tahun 2015-2019; dan (5) perusahaan yang mengalami laba pada tahun 2015-2019.

Pengukuran Variabel

Variabel Dependen

Variabel dependen penelitian ini agresivitas pajak. Agresivitas pajak yaitu penurunan *explicit tax value* melalui teknik penghematan pajak secara legal sampai dengan ilegal dengan penentuan derajat agresif sendiri oleh pihak yang menguasainya (Hanlon & Heitzman, 2010). Agresivitas pajak diukur melalui tarif pajak efektif (ETR). ETR diperoleh melalui *tax expense* dibagi *pretax income*. ETR mengukur pembayaran beban pajak tahun berjalan, yang di dalamnya mencakup beban pajak kini dan tangguhan. (Hanlon & Heitzman, 2010), (Aswadi et al., 2017), (Ajili & Khlif, 2020), dan (Adhikari et al., 2006).

Variabel Independen

Variabel independen penelitian ini koneksi politik. Perusahaan terkoneksi politik jika seorang *manager*, *shareholder* mayoritas, *shareholder* blok atau kerabat dekat sebelumnya, sedang, maupun pernah memiliki suatu jabatan dalam parlemen, petinggi negara, atau partai perwakilan parlemen, dikecualikan Tentara Nasional Indonesia dan kepolisian (Faccio, 2006). Koneksi politik dinilai melalui *dummy model* yang diberikan nilai 1 jika perusahaan terkoneksi politik dan diberikan nilai 0 jika tidak terkoneksi politik.

Variabel Moderasi

Variabel moderasi penelitian ini diversitas gender. Diversitas gender diukur dengan persentasi jumlah wanita di dewan direksi. Diversitas gender dihitung dengan cara jumlah wanita pada dewan direksi dibagi dengan jumlah dewan direksi (Boussaidi & Hamed-Sidhom, 2020); (Hoseini et al., 2019), dan (Lanis et al., 2017).

Variabel Kontrol

Variabel kontrol penelitian ini ukuran perusahaan, ROA, dan *capital intensity*. Ukuran perusahaan dapat dijadikan sebagai motivasi bagi perusahaan melakukan agresivitas pajak. Semakin tinggi jumlah aset, semakin kompleks kegiatan usaha perusahaan. Perusahaan besar cenderung memiliki tingkat kerumitan usaha yang lebih rumit dari pada perusahaan kecil. Ukuran perusahaan diukur dengan *logaritma natural total dari asset* sebesar nilai buku (Aswadi et al., 2017), (Ajili & Khlif, 2020), dan (Adhikari et al., 2006).

ROA untuk mengukur keuntungan entitas yang diperoleh melalui pemanfaatan *asset*. ROA diperoleh dengan membagi laba bersih dengan total *asset* (Aswadi et al., 2017), (Ajili & Khlif, 2020), dan (Adhikari et al., 2006).

Capital intensity mengacu pada seberapa besar proporsi asset tetap pada total asset perusahaan. Pengukuran intensitas modal yaitu total asset tetap dibagi total aset. *Capital intensity* memiliki hubungan dengan pajak. Ketika proporsi asset tetap cukup tinggi maka perusahaan akan dihadapkan pada beban penyusutan yang tinggi pula (Aswadi et al., 2017), (Ajili & Khlif, 2020), dan (Adhikari et al., 2006).

Model Penelitian

Model penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Moderasi. Data diolah menggunakan *Software* STATA. Menurut Sharma (1981) *moderating variabel* diartikan sebagai variabel bebas yang akan mampu menguatkan atau melemahkan

korelasi *independent variable* lainnya terhadap *dependent variable*. Model penelitian ini adalah berikut.

$$ETR = \alpha_0 + \beta_{10}PolCon_{i,t} + \beta_{11} DIV_GD_{i,t} + \beta_{12}PolCon_{i,t} * DIV_GD_{i,t} + \beta_{13}SIZE_{i,t} + \beta_{14}ROA_{i,t} + \beta_{15}CI_{i,t} + e_{i,t}$$

Keterangan:

- ETR : *Effective Tax Rate*;
- PolCon : Koneksi Politik;
- DIV_GD : Diversitas Gender;
- SIZE : Ukuran perusahaan;
- ROA : *Return on Asset*; dan
- CI : *Capital Intensity*.

Tabel 1
Operasional dan Pengukuran Variabel

Variable	Definisi Operasional	Pengukuran
Variabel Dependen: Agresivitas Pajak (TAG)	Agresivitas pajak adalah penurunan <i>explicit tax value</i> melalui teknik penghematan pajak secara legal sampai dengan ilegal dengan penentuan derajat agresif sendiri oleh pihak yang menguasainya (Hanlon & Heitzman, 2010), (Aswadi et al., 2017), (Ajili & Khlif, 2020), dan (Adhikari et al., 2006).	$ETR = \frac{\text{tax expense}}{\text{pretax income}}$
Variabel Independen: Koneksi Politik (PolCon)	Perusahaan terkoneksi politik jika seorang <i>manager</i> , <i>shareholder</i> mayoritas, <i>shareholder</i> blok atau kerabat dekat sebelumnya, sedang, maupun pernah memiliki suatu jabatan dalam parlemen, petinggi negara, atau partai perwakilan parlemen, dikecualikan Tentara Nasional Indonesia dan kepolisian (Faccio, 2006).	Koneksi politik dinilai dengan <i>dummy model</i> , yaitu jika entitas terkoneksi politik diberikan nilai 1. Jika entitas tidak terkoneksi politik, diberikan nilai 0.
Variabel Moderasi: Diversitas Gender (DIV_GD)	Diversitas gender merupakan persentase jumlah wanita di dewan direksi. Diversitas gender dihitung dengan cara jumlah wanita pada dewan direksi dibagi dengan jumlah dewan direksi (Boussaidi & Hamed-Sidhom, 2020); (Hoseini et al., 2019), dan (Lai et al., 2017).	$DivGen = \frac{\text{Jumlah Wanita pada Dewan Direksi}}{\text{Jumlah Dewan Direksi}}$
Variabel Kontrol: 1. Ukuran Perusahaan (SIZE)	Pengukuran ukuran perusahaan dilakukan dengan cara logaritma natural dari total asset sebesar nilai buku (Aswadi et al., 2017), (Ajili & Khlif, 2020), dan (Adhikari et al., 2006).	$SIZE = \ln(\text{Total Aset})$

Variable	Definisi Operasional	Pengukuran
2. ²³ <i>Return On Asset (ROA)</i>	ROA merupakan adalah <i>ratio</i> untuk mengukur keuntungan perusahaan yang diperoleh melalui pemanfaatan <i>asset</i> (Aswadi et al., 2017), (Ajili & Khlif, 2020), dan (Adhikari et al., 2006).	$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Asset}}$
3. <i>Capital Intensity (CI)</i>	⁴² <i>Capital Intensity</i> mengacu pada seberapa besar proporsi aset tetap terhadap total aset perusahaan yang diukur dengan total aset tetap dibagi total aset (Aswadi et al., 2017), (Ajili & Khlif, 2020), dan (Adhikari et al., 2006).	$Capital Intensity = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Asset}}$

²⁹ **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 2
Statistik Deskriptif

	N	Mean	Std. Dev.	Minimum	Maximum
ETR	135	0.303	0.314	0.000	3.527
DIV_GD	135	0.089	0.141	0.000	0.500
Size	135	29.315	2.399	22.352	39.224
CI	135	0.667	0.758	0.000	9.041
ROA	135	0.059	0.001	0.001	0.380
Valid N (listwise)	331				

¹ Variabel Dummy			
Variabel	%Score1	%Score0	Total%
PolCon	(50) 37%	(85) 63%	(135) 100%

Berdasarkan Tabel ², diketahui bahwa variabel dependen dalam penelitian ini yaitu Agresivitas Pajak memiliki nilai rata-rata sebesar 0.303. Rentang ini cukup rendah pada variabel ini, dilihat dari perbedaan antara nilai maksimum dan minimum. Variabel independen penelitian koneksi politik yang diukur menggunakan variabel *dummy* 1 apabila perusahaan terkoneksi politik dan 0 untuk sebaliknya. Hasil penelitian didapatkan 50 perusahaan yang dewan direksinya terkoneksi dengan politik dengan presentase 37%. Perusahaan yang tidak terkoneksi dengan politik sebesar 85 dengan present ¹⁵ 63%.

Variabel Moderasi dalam penelitian ini diversitas gender yang diukur dengan rasio anggota dewan direksi wanita yang diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan. Nilai rata-rata yang diperoleh adalah 0.089. Hasil menunjukkan bahwa rata-rata sampel anggota dewan direksi wanita dalam perusahaan memiliki 8,9% dalam perusahaan sampel. ¹⁴

Variabel kontrol yang pertama yakni ukuran perusahaan yang diukur ⁵⁶ menggunakan logaritma natural dari aset. Nilai rata-rata yang diperoleh adalah 29.315. Rentang ini cukup rendah pada variabel ini, dilihat dari perbedaan antara nilai

30 maksimum dan minimum. Variabel kontrol yang kedua yakni *capital intensity* yang diukur menggunakan total aset tetap dari total aset. Nilai rata-rata yang diperoleh adalah 0.667. Rentang ini cukup rendah pada variabel ini, dilihat dari perbedaan antara nilai maksimum dan minimum. Variabel kontrol yang ketiga yakni profitabilitas yang diukur menggunakan ROA. Nilai rata-rata yang diperoleh adalah 0.059. Rentang ini cukup rendah pada variabel ini, dilihat dari perbedaan antara nilai maksimum dan minimum.

Tabel 3
Person Correlation

	Koneksi Politik	Diversitas Gender	ETR	Size	CI	Profit
PolCon	1.000					
DIV_GD	0.166* (0.055)	1.000				
ETR	0.242** (0.005)	-0.007 (0.936)	1.000			
Size	-0.239** (0.005)	-0.225** (0.009)	-0.059 (0.500)	1.000		
CI	-0.150* (0.082)	0.096 (0.269)	-0.063 (0.467)	-0.133 (0.123)	1.000	
ROA	-0.012 (0.892)	0.080 (0.355)	0.215* (0.012)	0.094 (0.277)	-0.010 (0.910)	1.000

10 p-values in parentheses

* $p < 0.1$, * $p < 0.05$, ** $p < 0.01$

1 Hasil Analisis Regresi Moderasi

60 Hipotesis penelitian ini diuji dengan analisis regresi moderasi. Sebelum 37 dilakukan uji regresi moderasi, peneliti melakukan uji asumsi klasik yakni uji normalitas data, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas. Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui data penelitian yang sudah berdistribusi normal dan data bebas dari heteroskedastisitas dan multikolinearitas. Model penelitian ini sudah 34 dilakukan uji regresi linear berganda karena sudah lolos dari uji asumsi klasik. Nilai *adjusted R2* sebesar 0,078 yang artinya variabel 54 independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 7,8% sementara 92,2% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain diluar model penelitian.

Tabel 4
Moderated Regression Analysis

Variabel	ETR				
	Coef	Std. Err	t	P>t	
PolCon	0.1861205	0.0663008	2.81	0.006	
Size	-0.0059108	0.011653	-0.51	0.613	
CI	-0.0141404	0.0359741	-0.39	0.695	
ROA	1.282951	0.4704264	2.73	0.007	
DIV_GD	0.008508	0.2802654	0.03	0.976	
Polcon*DIV_GD	-0.321094	0.3814161	-0.84	0.401	
F	0.0128				
Adj-R2	0.0757				

Variabel	ETR			
	Coef	Std. Err	t	P>t
R2	0.1170			
	135			

t statistics in parentheses

* p < 0.1, ** p < 0.05, *** p < 0.01

Variabel agresivitas pajak diproksikan menggunakan ETR, dimana interpretasi ETR berbanding terbalik dengan agresivitas pajak (agresivitas pajak = ETR dikalikan dengan -1). Hasil penelitian Tabel 3 menunjukkan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Variabel koneksi politik menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,1861205 dan nilai signifikansi sebesar 0,006. Nilai tersebut mengindikasikan pengaruh positif antara koneksi politik terhadap ETR, yang berarti menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif antara koneksi politik terhadap agresivitas pajak. Semakin tinggi koneksi politik maka akan semakin tinggi nilai ETR, yang berarti semakin tinggi koneksi politik pada perusahaan maka semakin rendah tingkat agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan demikian H₁ ditolak.

Variabel interaksi antara koneksi politik dan diversitas gender sebesar 0,401 yang artinya tidak dapat memoderasi. Peneliti telah membuang data sampel perusahaan yang dewan direksinya terdiri atas laki-laki saja (satu gender). Pengaruh diversitas gender terhadap agresivitas pajak sebesar 0,404 yang berarti diversitas gender tidak dapat memoderasi. Berdasarkan hasil tersebut maka variabel moderasi diversitas gender tidak dapat memperlemah pengaruh koneksi politik terhadap agresivitas pajak, sehingga H₂ ditolak.

Tabel 5
Uji Robust

	(1) ETR	(2) ETR	(3) ETR
PolCon	0.151** (2.15)	0.158** (2.05)	0.186*** (2.81)
Size	-0.004 (-0.93)	-0.005 (-1.17)	-0.006 (-0.51)
CI	-0.012 (-1.42)	-0.010 (-0.84)	-0.014 (-0.39)
ROA	1.236** (2.59)	1.277** (2.52)	1.283*** (2.73)
DIV_GD		-0.162 (-0.87)	0.009 (0.03)
KP*DIV_GD			-0.321 (-0.84)
_cons	0.289** (2.49)	0.349*** (2.65)	0.355 (1.00)
N	135	135	135
R ²	0.107	0.124	0.117
F	0.000	0.000	0.000

t statistics in parentheses

* p < 0.1, ** p < 0.05, *** p < 0.01

Tabel 5 merupakan hasil uji *robust*. Dalam pengujian regresi ditemukan hal-hal yang dilanggar dalam pengujian asumsi klasik. Pengujian ini dapat dilakukan untuk

mengurangi bias dari hasil penelitian dan penting untuk menganalisis data yang dipengaruhi oleh outlier dan meminimalkan pengaruh outlier terhadap suatu model sehingga akan diperoleh model yang terbaik. Temuan ini juga kuat dengan hampir tidak ada perbedaan dengan regresi linier berganda dengan tingkat signifikan.

Pengaruh Koneksi Politik terhadap Agresivitas Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak. Teori *Bureaucratic Incentive Effect* menjelaskan kondisi ketika *political connection* berdampak pada semakin rendahnya tindakan agresivitas pajak. Koneksi politik dapat meningkatkan pengawasan dalam perusahaan. Perusahaan yang membina suatu koneksi politik memiliki kemungkinan besar untuk dipantau secara ekstensif oleh pembuat kebijakan, pemerintah, media, serta masyarakat. Pengawasan ekstensif ini membuat perusahaan tersebut akan lebih memilih menghindari aktivitas berisiko, seperti agresivitas pajak.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yaitu (Chaney et al., 2011), (Jariyanto et al., 2012), (Pranoto et al., 2013), (Hijriani et al., 2017), dan (Nurrahmi & Rahayu, 2020) yang menemukan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Perusahaan yang terkoneksi politik akan menjadi perhatian publik, sehingga perusahaan lebih berhati-hati dalam membayar pajak. Perusahaan menghindari kegiatan yang menimbulkan risiko reputasi perusahaan, seperti resiko yang ditimbulkan dari agresivitas pajak (Chaney et al., 2011). Perusahaan yang terkoneksi politik dapat memanfaatkan koneksinya dalam hal penghindaran pajak, tetapi perusahaan tidak selalu menggunakan koneksinya karena lebih memilih menjaga citra perusahaan agar dipercaya oleh masyarakat, media, pemerintah, maupun investor demi menjaga eksistensi perusahaan di masa depan (Nurrahmi & Rahayu, 2020). Walaupun perusahaan terkoneksi secara politik, perusahaan tetap berupaya untuk berkontribusi pada negara melalui pembayaran pajak yang berjumlah besar. Perusahaan tidak berkeinginan memanfaatkan koneksi politiknya untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan (Pranoto et al., 2013). Eksekutif perusahaan, khususnya perusahaan BUMN lebih memilih untuk membayar pajak tertinggi BUMN karena bertujuan agar dapat berkontribusi dan mengambil hati pemerintah, yang pada akhirnya eksekutif perusahaan BUMN tersebut akan mendapatkan penilaian yang baik dari pemerintah, sehingga dapat dipertahankan menjadi direktur utama atau dipromosikan menjadi pimpinan perusahaan pada jenis perusahaan BUMN yang lebih besar (Jian et al., 2012).

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian sebelumnya dari (Adhikari et al., 2006), (Aryanto et al., 2017), (Ajili & Khelif, 2020), dan (Kim & Zang, 2015) yang menemukan bahwa koneksi politik berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak pada perusahaan. Perusahaan yang terhubung secara politik membayar pajak secara signifikan ETR lebih rendah dari perusahaan lain. Hasil penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian (Drope & Hansen, 2009) dan (Ayu et al., 2017) yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh koneksi politik terhadap agresivitas pajak.

Moderasi Diversitas Gender pada Pengaruh Koneksi Politik terhadap Agresivitas Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa diversitas gender tidak dapat memoderasi pengaruh negatif koneksi politik terhadap agresivitas pajak. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa diversitas gender dapat

memperlemah pengaruh koneksi politik terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian ini menentang Teori Gender pandangan bias *alpha* yang menekankan perbedaan antara pria dan wanita. Namun, hasil penelitian mendukung Teori Gender pandangan bias *beta* yang cenderung mengabaikan perbedaan antara pria dan wanita.

Tidak adanya moderasi ini disebabkan karena wanita memiliki kesempatan yang sama dalam melakukan agresivitas pajak. Wanita memiliki kesamaan dengan pria dalam memberikan nasihat terkait pajak yang agresif maupun strategi dalam mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan. Perbedaan gender akan dikesampingkan perusahaan ketika seseorang masuk dan bekerja dalam profesi tertentu di mana perilaku atau keputusan individu tidak ditentukan oleh jenis kelamin mereka. Wanita terlalu disosialisasikan dengan lebih kuat ke dalam profesi dan budaya organisasi, dengan demikian lebih mungkin untuk bertindak sesuai dengan peran pekerjaan, daripada peran gender mereka.

Hal ini didukung dengan penelitian (Bobek et al., 2013) yang mengungkapkan wanita memiliki kemungkinan yang sama dalam memberikan nasihat terkait pajak yang agresif, serta didukung oleh penelitian (Nasution & Jonnergård, 2017) yang menjelaskan bahwa perbedaan gender akan ditolak begitu wanita dan pria memasuki profesi atau pekerjaan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian (Deslandes et al., 2020), (Oyenike & Olayinka, 2016), dan (Ariyanto, 2020) yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan antara wanita dan pria dalam melakukan agresivitas pajak. Hasil penelitian ini tidak membuktikan bahwa wanita dapat mengurangi tindakan agresivitas pajak daripada pria.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Boussaidi & Hamed-Sidhom, 2020), (Damayanti & Supramono, 2019), (Lanis et al., 2017), (Francis et al., 2014), (Hoseini et al., 2019), (Murteira & Roença, 2020), (Riguen et al., 2020), (Khlif & Acheh, 2017), (Jarboui et al., 2020) yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan karakter dan perilaku antara wanita dan pria dalam mempengaruhi tindakan pajak yang agresif.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Koneksi politik dapat meningkatkan pengawasan dalam perusahaan. Perusahaan yang terkoneksi politik memiliki kemungkinan besar untuk dipantau secara ekstensif oleh pembuat kebijakan, pemerintah, media, serta masyarakat. Pengawasan ekstensif ini membuat perusahaan tersebut akan lebih memilih menghindari aktivitas berisiko, seperti agresivitas pajak. Perusahaan yang terkoneksi politik, tidak selalu menggunakan koneksinya dalam hal manajemen pajak yang agresif karena perusahaan lebih memilih berkontribusi kepada negara melalui pembayaran pajak yang semestinya dengan tujuan menjaga citra perusahaan.

Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa diversitas gender tidak dapat memoderasi pengaruh negatif koneksi politik terhadap agresivitas pajak. Diversitas gender tidak dapat mempengaruhi perilaku perusahaan dalam melakukan manajemen pajak yang agresif. Wanita memiliki kemungkinan yang sama dengan pria dalam memberikan nasihat terkait pajak yang agresif. Kesetaraan gender mempengaruhi hasil ini, yang mana perbedaan gender akan ditolak begitu wanita dan pria memasuki profesi atau pekerjaan.

Penelitian ini berkontribusi kepada pemerintah dalam pembuatan regulasi terkait perpajakan dan masukan kepada pemerintah untuk memberikan perhatian pada koneksi politik sebagai celah adanya manajemen pajak yang agresif. Penelitian ini juga berkontribusi bagi perusahaan dalam memberikan pertimbangan untuk menghindari agresivitas pajak karena dapat merusak reputasi perusahaan, serta memberikan masukan pada perusahaan untuk memberikan perhatian pada koneksi politik dan diversitas gender agar tidak menyalahi aturan terkait undang-undang perpajakan.

Keterbatasan

Penelitian ini mempunyai keterbatasan yaitu hanya dilakukan pada perusahaan publik sektor pertambangan di Indonesia tahun 2015-2019 dan hanya menyelidiki diversitas gender sebagai variabel moderasi. Penelitian ini hanya menggunakan 1 *proxy* pengukuran agresivitas pajak berupa *effective tax rate* (ETR), serta pengukuran koneksi politik menggunakan variabel *dummy*.

58

Saran Untuk Penelitian Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan unit analisis secara lebih luas agar dapat lebih menggeneralisasikan hasil penelitian, serta menggunakan variabel moderasi yang lain, seperti yang dimungkinkan dapat memperlemah atau memperkuat pengaruh koneksi politik terhadap agresivitas pajak. Peneliti selanjutnya juga diharapkan menggunakan pengukuran agresivitas pajak dan koneksi politik lebih secara dalam lagi, yaitu menggunakan *Cash ETR*, *Current ETR*, maupun *Different ETR* sebagai *proxy* pengukuran agresivitas pajak. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan definisi koneksi politik dengan menggunakan metode observasi dan wawancara untuk menemukan pengukuran yang lebih objektif pada koneksi politik.

Artikel Abidah, Syafiq, dan Wahyu_MRAAI 2021

ORIGINALITY REPORT

21 %
SIMILARITY INDEX

17 %
INTERNET SOURCES

9 %
PUBLICATIONS

8 %
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	journal.stiemb.ac.id Internet Source	1 %
2	Effiezal Aswadi Abdul Wahab, Akmalia M. Ariff, Marziana Madah Marzuki, Zuraidah Mohd Sanusi. "Political connections, corporate governance, and tax aggressiveness in Malaysia", Asian Review of Accounting, 2017 Publication	1 %
3	publikasiilmiah.ums.ac.id Internet Source	1 %
4	lib.atmajaya.ac.id Internet Source	1 %
5	repository.unpas.ac.id Internet Source	1 %
6	repository.stie-mce.ac.id Internet Source	1 %
7	Submitted to Konsorsium PTS Indonesia - Small Campus II Student Paper	1 %

8	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	1 %
9	erepo.unud.ac.id Internet Source	1 %
10	www.tandfonline.com Internet Source	1 %
11	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Student Paper	1 %
12	repository.uib.ac.id Internet Source	1 %
13	jurnal.radenfatah.ac.id Internet Source	<1 %
14	digilib.unila.ac.id Internet Source	<1 %
15	id.scribd.com Internet Source	<1 %
16	www.repository.trisakti.ac.id Internet Source	<1 %
17	Nur Hidayah. "Gender, Pengetahuan Keuangan, dan Niat Bertansaksi Saham", Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Asia, 2018 Publication	<1 %

18	Erni Dwijayanti, Risal Rinofah, Pristin Prima Sari. "Pengaruh Intellectual Capital, CSR, dan GCG terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2019", Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 2021 Publication	<1 %
19	ejournal.stiemj.ac.id Internet Source	<1 %
20	ejournal.umm.ac.id Internet Source	<1 %
21	eprints.umk.ac.id Internet Source	<1 %
22	Submitted to Doral Academy High School Student Paper	<1 %
23	adoc.tips Internet Source	<1 %
24	d-nb.info Internet Source	<1 %
25	fmi.or.id Internet Source	<1 %
26	jurnal.unai.edu Internet Source	<1 %
27	www.neliti.com Internet Source	<1 %

28

Darti Djuhari, Wahyu Alif Kurniawan.
"Pengungkapan Corporate Social
Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak",
JIATAX (Journal of Islamic Accounting and Tax),
2020

Publication

<1 %

29

stie.dewantara.ac.id

Internet Source

<1 %

30

Submitted to UIN Raden Intan Lampung

Student Paper

<1 %

31

ejournal.stkip-mmb.ac.id

Internet Source

<1 %

32

jea.ppj.unp.ac.id

Internet Source

<1 %

33

journal.ubm.ac.id

Internet Source

<1 %

34

Submitted to Binus University International

Student Paper

<1 %

35

Kusuma Indawati Halim. "Pengaruh Leverage,
Opini Audit Tahun Sebelumnya, Pertumbuhan
Perusahaan, dan Ukuran Perusahaan
terhadap Opini Audit Going Concern", Owner,
2021

Publication

<1 %

36

Laras Putri Maidina, Lela Nurlaela Wati.
"PENGARUH KONEKSI POLITIK, GOOD

<1 %

CORPORATE GOVERNANCE DAN KINERJA
KEUANGAN TERHADAP TAX AVOIDANCE",
JURNAL AKUNTANSI, 2020

Publication

37

Submitted to Udayana University

Student Paper

<1 %

38

Submitted to Universitas Negeri Semarang

Student Paper

<1 %

39

repository.unika.ac.id

Internet Source

<1 %

40

Desi Ambarsari, Dudi Pratomo, Kurnia Kurnia.
"Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Gender
Diversity pada Dewan, dan Kualitas Auditor
Eksternal terhadap Agresivitas Pajak (Studi
pada Perusahaan Sektor Property dan Real
Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia
Periode 2013-2017)", Kompartemen: Jurnal
Ilmiah Akuntansi, 2020

Publication

<1 %

41

download.garuda.ristekdikti.go.id

Internet Source

<1 %

42

jrap.univpancasila.ac.id

Internet Source

<1 %

43

Ayu Vepri Liani, Saifudin Saifudin. "LIKUIDITAS,
LEVERAGE, PROFITABILITAS, UKURAN
PERUSAHAAN DAN CAPITAL INTENSITY :

<1 %

IMPLIKASINYA TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK", Solusi, 2020

Publication

44

Tamara Irna Sari, Isbandini Veterina. "Pengaruh Return on Asset, Total Assets Turnover, Price Earning Ratio dan Dividend Per Share Terhadap Harga Saham (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Pertambangan yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2019)", Jurnal EMT KITA, 2021

Publication

<1 %

45

lib.unnes.ac.id

Internet Source

<1 %

46

ojs.uajy.ac.id

Internet Source

<1 %

47

Hendra Rahmat Pratama, Elmira Febri Damayanti. "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MAHASISWA AKUNTANSI TERHADAP PEMILIHAN KARIR SEBAGAI CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF INDONESIA", Jurnal Akuntansi AKTIVA, 2020

Publication

<1 %

48

Rena Mustari Mokoginta, Herman Karamoy, Linda Lambey. "Pengaruh Komisaris Independen, Dewan Pengawas Syariah, Kepemilikan Institusional, dan Profitabilitas Terhadap Tingkat Pengungkapan Tanggung-

<1 %

jawab Sosial pada Bank Syariah di Indonesia",
JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING
"GOODWILL", 2018

Publication

49	ebooktake.in Internet Source	<1 %
50	fr.slideshare.net Internet Source	<1 %
51	id.m.wikipedia.org Internet Source	<1 %
52	inspirasi.bpsdm.jabarprov.go.id Internet Source	<1 %
53	jurnal.untan.ac.id Internet Source	<1 %
54	publikasi.mercubuana.ac.id Internet Source	<1 %
55	repo.unr.ac.id Internet Source	<1 %
56	repository.widyatama.ac.id Internet Source	<1 %
57	Ai Hendrani, Dadan Ramdhani, Thika Febriani, Sriyani Sriyani. "Corporate Tax Avoidance: Kontribusi Mekanisme Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Industri Manufaktur Sektor	<1 %

Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018", STATERA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 2020

Publication

58

Dwi Fionasari. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak pada Perusahaan Pertambangan Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016-2018", Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan, 2020

Publication

<1 %

59

Naomi Puspita Sari, Muhammad Khafid. "Peran Kepemilikan Manajerial dalam Memoderasi Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kebijakan Dividen Terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan BUMN", Moneter - Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 2020

Publication

<1 %

60

Yayah Rahyasih, Johar Permana, Liah Siti Syarifah. "Bagaimana Inspeksi, Kontrol dan Supervisi mempengaruhi Pembinaan dan Pengembangan dari Pengawas Sekolah: Efek pada Kompetensi Kepala Sekolah", Tadbir : Jurnal Studi Manajemen Pendidikan, 2020

Publication

<1 %

61

danielstephanus.wordpress.com

Internet Source

<1 %

62

dianaoktasari.blogspot.com

Internet Source

<1 %

63

journal.ubaya.ac.id

Internet Source

<1 %

64

pt.scribd.com

Internet Source

<1 %

65

Silvia Sarina, Aprilia Lubis, Linda Linda. "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Debt To Equity Ratio, Return On Equity Dan Current Ratio Untuk Mengidentifikasi Financial Distress Pada Perusahaan Properti Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2017.", Owner (Riset dan Jurnal Akuntansi), 2020

Publication

<1 %

66

Leonardus Matangkin, Suwandi Ng, Ana Mardiana. "PENGARUH KEMAMPUAN MANAJERIAL DAN KONEKSI POLITIK TERHADAP REAKSI INVESTOR DENGAN KECURANGAN LAPORAN KEUNGAN SEBAGAI VARIABEL MEDIASI", SIMAK, 2018

Publication

<1 %

67

Ng Husin, Rosna Agustina, Anna Sofia Atichasari, Chintya Mega Pratiwi. "Peran Manajemen Laba, Kompensasi Direksi, dan

<1 %

Kepemilikan Saham Direksi Terhadap Agresivitas Pajak Pada Industri Manufaktur di Indonesia", STATERA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 2020

Publication

68

journal.unismuh.ac.id

Internet Source

<1 %

69

konsultasiskripsi.com

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH

Judul Jurnal Ilmiah (Artikel) : Political Connections and Tax Aggressiveness: The Role of Gender Diversity as a Moderating Variable

Penulis Jurnal Ilmiah : Abidah Dwi Rahmi Satiti, Mohammad Syafik, Wahyu Widarjo

Identitas Jurnal Ilmiah : a. Nama Jurnal : Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi
 b. Nomor : p-ISSN: 1411-8831 e-ISSN: 2442-9708
 ISSN
 c. Volume, : 21, 2, September 2021
 Nomor, Edisi
 d. Penerbit : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi dan Bisnis (LPFEB)
 Universitas Trisakti
 e. DOI artikel : <http://dx.doi.org/10.25105/mraai.v21i2.9794>
 (jika ada)

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah
 (beri \checkmark pada kategori yang tepat) :

<input type="checkbox"/>	Jurnal Ilmiah Internasional
<input checked="" type="checkbox"/>	Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
<input type="checkbox"/>	Jurnal Ilmiah Nasional Tidak Terakreditasi

Hasil Penilaian Validasi :

No	Aspek	Uraian/Komentar Penilaian
1	Indikasi Plagiasi	Hasil cek turnitin 21%. Tidak ada indikasi plagiasi
2	Linearitas	Karya ilmiah sesuai dengan bidang ilmu akuntansi

Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah			Nilai Akhir yang Diperoleh
	Internasional <input type="checkbox"/>	Nasional Terakreditasi <input checked="" type="checkbox"/>	Nasional Tidak Terakreditasi <input type="checkbox"/>	
a. Kelengkapan unsur isi Jurnal (10%)		2.5		2.5
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)		7.5		7
c. Kecukupan dan kemutakhiran data / informasi dan metodologi (30%)		7.5		7
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)		7.5		7.5
Total = (100%)		25		24
e. Kontribusi Pengusul Sebagai : Anggota Penulis Koresponden/Co-author : Co-Author Urutan Author : 3 Jumlah Anggota : 2 Presentase : (20%) (20% * 25)		5		
TOTAL NILAI (0.2 * 24)		4.8		

Komentar/Ulasan Peer Review

Karya ilmiah sudah memenuhi kriteria publikasi di jurnal nasional terakreditasi Sinta 2.

Catatan Penilaian Artikel oleh Reviewer :

1. **Kesesuaian dan Kelengkapan unsur isi jurnal** : Karya ilmiah sudah memenuhi semua unsur kelengkapan yang sesuai dengan standar publikasi di jurnal nasional terakreditasi sinta 2.
2. **Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan** : Topik penelitian yang dilakukan penulis adalah penghindaran di Indonesia. Isu yang penghindaran pajak tersebut relevan dengan kondisi di Indonesia. Hasil analisis data dan pembahasan sudah dideskripsikan secara mendalam dengan didukung dengan kajian teori dan hasil riset terdahulu yang relevan. Selain itu hasil analisis data juga disajikan dengan baik dan sistematis sesuai dengan tujuan penelitian.
3. **Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi** : Jumlah sampel yang dianalisis sudah representatif. Data yang digunakan juga sudah mutakhir. Definisi operasional dan pengukuran variabel sudah dijelaskan dengan baik dan didukung oleh referensi yang relevan. Teknik analisis data sudah sesuai dengan tujuan penelitian dan hasil analisis data sudah dijelaskan secara runtut dan sistematis.
4. **Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan** : Penerbit jurnal merupakan lembaga pendidikan yang kredibel yaitu Universitas Trisakti. Jurnal tersebut terindeks Sinta 2 dengan H-Index 22 dan sitasi selama 5 tahun terakhir sebesar 1540. Artinya jurnal tersebut memiliki impact factor yang tinggi.

Surakarta, 5 Januari 2022

Reviewer I



Prof. Drs. Djoko Suhardjanto, M.Com.(Hons), Ph.D., Ak

NIP. 196302031989031006

Unit Kerja : Fakultas Ekonomi dan Bisnis

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH

Judul Jurnal Ilmiah (Artikel) : Political Connections and Tax Aggressiveness: The Role of Gender Diversity as a Moderating Variable

Penulis Jurnal Ilmiah : Abidah Dwi Rahmi Satiti, Mohammad Syafik, Wahyu Widarjo

Identitas Jurnal Ilmiah : a. Nama Jurnal : Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi
 b. Nomor : p-ISSN: 1411-8831 e-ISSN: 2442-9708
 ISSN
 c. Volume, : 21, 2, September 2021
 Nomor, Edisi
 d. Penerbit : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi dan Bisnis (LPFEB)
 Universitas Trisakti
 e. DOI artikel : <http://dx.doi.org/10.25105/mraai.v21i2.9794>
 (jika ada)

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah (beri \checkmark pada kategori yang tepat) :

Jurnal Ilmiah Internasional

Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi

Jurnal Ilmiah Nasional Tidak Terakreditasi

Hasil Penilaian Validasi :

No	Aspek	Uraian/Komentar Penilaian
1	Indikasi Plagiasi	Hasil cek turnitin 21%. Tidak ada indikasi plagiasi.
2	Linearitas	Topik karya ilmiah sesuai dengan bidang ilmu akuntansi.

Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah			Nilai Akhir yang Diperoleh
	Internasional <input type="checkbox"/>	Nasional Terakreditasi <input checked="" type="checkbox"/>	Nasional Tidak Terakreditasi <input type="checkbox"/>	
a. Kelengkapan unsur isi Jurnal (10%)		2.5		2.5
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)		7.5		7
c. Kecukupan dan kemitakhiran data / informasi dan metodologi (30%)		7.5		7
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)		7.5		7.5
Total = (100%)		25		24
e. Kontribusi Pengusul Sebagai : Anggota Penulis Koresponden/Co-author : Co-Author Urutan Author : 3 Jumlah Anggota : 2 Prosentase : (20%) (20% * 25)		5		
TOTAL NILAI (0.2 * 24)		4.8		

Komentar/Ulasan Peer Review

Karya ilmiah sudah memenuhi kriteria sebagai publikasi pada jurnal nasional terakreditasi sinta 2.

Catatan Penilaian Artikel oleh Reviewer :

1. Kesesuaian dan Kelengkapan unsur isi jurnal : Karya ilmiah sudah memenuhi semua unsur kelengkapan yang sesuai dengan standar publikasi di jurnal nasional bereputasi.

2. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan : Ruang lingkup penelitian sudah sesuai dengan ruang lingkup jurnal. Topik penelitian tentang penghindaran pajak sudah sesuai dengan bidang ilmu akuntansi, khususnya akuntansi perpajakan. Pengkaitan koneksi politik dengan praktik penghindaran pajak dengan moderasi diversitas gender merupakan ide penelitian yang baik dan relevan dengan kondisi di Indonesia. Pembahasan hasil penelitian sudah dijelaskan dengan runtut dan sistematis. Pembahasan hasil penelitian juga sudah didukung dengan literatur yang relevan dengan topik penelitian.

3. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi : Data penelitian sudah memenuhi unsur kecukupan dalam analisis data statistik. Selain itu data yang digunakan juga sudah mutakhir. Teknik sampling dan definisi operasional serta pengukuran variabel sudah dideskripsikan dengan baik dan disajikan dalam bentuk tabel yang mudah dipahami. Metode dan teknik analisis data sudah tepat dan sesuai dengan tujuan penelitian.

4. Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan : Publisher jurnal merupakan perguruan tinggi yang kredibel. Para penulis artikel di jurnal tersebut juga berasal dari berbagai perguruan tinggi ternama di Indonesia. Masing-masing artikel yang dipublikasi di jurnal tersebut juga sudah memiliki DOI.

Surakarta, 6 Januari 2022.

Reviewer 2

Dr. Eko Arief Sudaryono, M.Si., Ak

NIP. 196112311988031006

Unit Kerja : Fakultas Ekonomi dan Bisnis